

**PERAN YAYASAN SATU KARSA KARYA SURAKARTA
DALAM PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DESA
(Study Kasus Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Gunungkidul)**

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Program Studi Ilmu Politik



Oleh :
RISQO ILHAM PRAMUDYA
1606016031

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Lamp : 4 Lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Risqo Ilham Pramudya

NIM : 1606016031

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Yayasan Satu Karsa Karya dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Desa (Study kasus Desa Watusigar, Kecamatan, Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 April 2022

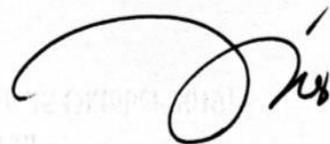
Bidang Subtansi Materi



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.

NIP. 196805051995031002

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Masrohatun, M.Si

NIP: 198806212018012001

SKRIPSI

PERAN YAYASAN SATU KARSA KARYA DALAM PEMBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN DESA

(Study Kasus Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)

Oleh

Risqo Ilham Pramudya

1606016031

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada hari Kamis, 21 April
2022 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Khoir M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji I

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

Pembimbing I

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031002

Sekretaris

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031002

Penguji II

Rofiq M.Si.
NIP. 197303052016011901

Pembimbing II

Masrohatun, M.Si
NIP: 198806212018012001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Peran Yayasan Satu Karsa Karya Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Desa (Study Kasus Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)” adalah hasil karya saya pribadi yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Seluruh sumber yang saya jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini telah saya sertakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jika di dalam penulisan skripsi ini terbukti adanya unsur-unsur plagiarisme atau terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 04 April 2022



Risqo Ilham Pramudya
NIM. 1606016031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul "*Peran Yayasan Satu Karsa Karya Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Desa (Study Kasus Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)*" ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Zaman Jahiliyah ke Zaman Islamiyyah seperti sekarang ini dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin.

Tidak sedikit hambatan yang ditemui penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini juga merupakan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag, dan Ibu Masrohatun, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan apresiasinya kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Segenap Dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Segenap Civitas Akademika Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam mendapatkan keperluan yang dibutuhkan pada penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hariadi dan Ibu Katmini, selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan secara moral maupun materil yang tidak terhingga, serta doa yang tidak hentinya dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam segala hal termasuk untuk penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu informan penelitian yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kawan-kawan organisasi ekstra dan intra yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman berharga kepada penulis dalam berproses di organisasi.
10. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabati penulis, yang telah mambantu dan menyemangati penulis untuk menyusun skripsi.
12. Teman-teman Ilmu Politik 2016, dan KKN MIT posko 80 Desa Wates Boyolali, yang telah memberikan dukungan dan banyak pengalaman dibidang non akademik
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan baik dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi pelajaran bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya.

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim serta mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:
Kedua orang tua saya, Bapak Hariadi dan Ibu Katmini yang telah mencurahkan segala doa baik serta dukungan yang tidak ternilai harganya selama hidup saya.*

*Kedua dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag, dan Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi kepada saya agar selalu semangat dalam berproses.
Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu.*

MOTTO

“Wanita berada di tempat di mana banyak keputusan dibuat, Wanita bukan seharusnya menjadi pengecualian”

(Ruth Bader Ginsburg)

“Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat”

(HR.Muslim)

ABSTRAK

Dalam proses pembangunan, peran perempuan adalah salah satu bagian penting dan tak dapat dipisahkan terlebih dalam lingkungan sosial masyarakat, termasuk masyarakat desa. Namun saat ini peran perempuan sebagai legislator dan pembuat kebijakan di lembaga legislatif dan pemerintahan masih tergolong minim, yang menyebabkan keberadaan perempuan belum terlalu dipertimbangkan. Rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik dikarenakan kurangnya kesadaran akan hak-haknya dalam politik dan mereka masih menganggap bahwa politik ialah dunianya kaum laki-laki, dan juga masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat umum yang menganggap perempuan tidak pantas berada di arena politik. Hal ini perlu adanya kesadaran dan meningkatkan pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan serta kesadaran bagi perempuan akan hak dan kewajibannya dalam bidang politik. Salah satu cara untuk meningkatkan representativ perempuan adalah dengan memberdayakan politik perempuan. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. Salah satu aktor dalam pemberdayaan ialah Lembaga swadaya masyarakat (LSM), LSM memiliki peranan penting di dalam struktur kemasyarakatan, sehingga LSM harus berperan dengan baik guna berjalannya struktur sosial masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana peran yayasan satu karsa karya dalam melakukan pemberdayaan perempuan desa, serta mengetahui apasaja faktor yang mempengaruhi pemberdayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) memposisikan kontribusi di tengah masyarakat melalui pendekatan kemasyarakatan baik secara humanis, populis maupun strategis yakni sebagai komunikator dan fasilitator bagi perempuan. Adapun peran Yayasan Satu karsa Karya dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan desa Watusigar di Gunung Kidul Yogyakarta melalui suatu kelompok yang diberi nama TIFA (tim informasi dan advokasi) YSKK fokus melakukan pemberdayaan politik perempuan dengan melaksanakan program peningkatan kapasitas perempuan. sekolah kepemimpinan perempuan dan workshop menjadi program dalam penguatan kapasitas. Faktor penghambat pemberdayaan politik perempuan yaitu budaya, tingkat pendidikan, ekonomi, sedangkan faktor pendukung yaitu peran serta Pemerintah, keuangan, dan pendamping pemberdayaan

Kata Kunci: LSM, Pemberdayaan, politik perempuan

ABSTRACT

In the development process, the role of women is an important and inseparable part, especially in the social environment of society, including rural communities. However, currently the role of women as legislators and policy makers in the legislative and government institutions is still relatively minimal, which causes the existence of women to not be considered too much. The low participation of women in politics is due to a lack of awareness of their rights in politics and they still think that politics is the world of men, and also the inherent patriarchal culture in the general public which considers women unfit to be in the political arena. This requires awareness and increasing political education that is able to create capabilities and awareness for women of their rights and obligations in the political field. One way to increase women's representation is to empower women's politics. This effort is carried out in order to provide knowledge and skills for the lower classes of society and increase their strength. One of the actors in empowerment is non-governmental organizations (NGOs), NGOs have an important role in the social structure, so NGOs must play a good role in order to run the social structure of society as a whole.

This research uses a qualitative method with a case study approach to describe and find out how the role of the one karsa work foundation in empowering village women is, as well as knowing what factors influence empowerment. Data collection techniques were carried out by means of interviews, and documentation. The data analysis techniques are data reduction, as well as data presentation and conclusion drawing.

This research shows that the Non-Governmental Organization (NGO) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) positions its contribution in the community through a social approach, both humanist, populist and strategic, namely communicator and as a facilitator for women. The role of the Satu Karsa Karya Foundation in carrying out political empowerment of women in Watusigar village in Gunung Kidul Yogyakarta through a group called TIFA (information and advocacy team). YSKK focuses on empowering women's politics by implementing programs to increase women's capacity. women's leadership schools and workshops are programs to strengthen capacity. The inhibiting factors for women's political empowerment are culture, education level, economy, while the supporting factors are the government's participation, finance, and empowerment assistants.

Keywords: NGO, Empowerment, women's politics

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN.....	17

A. PERAN LSM	17
B. PEMBERDAYAAN	18
BAB III	29
GAMBARAN UMUM	29
A. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	29
B. Potret Desa Watusigar.....	36
BAB IV	42
PERAN LSM YAYASAN SATU KARSA KARYA DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI DESA WATUSIGAR, GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA.....	42
A. Partisipasi Politik Perempuan Desa Watusigar	42
B. Peran Yayasan Satu Karsa Karya dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Desa Watusigar	
C. Implementasi Pemberdayaan Politik Perempuan Dengan Pihak Lain	63
D. Pencapaian (<i>Output</i>) Pemberdayaan Perempuan.....	64
BAB V.....	69
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI DESA WATUSIGAR, GUNUNGKIDUL	69
A. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Politik Perempuan.....	69
BAB VI.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran atau Rekomendasi	77

Daftar Gambar

Gambar 1.....	29
Gambar 2.....	37

Daftar Tabel

Tabel 1.....	35
Tabel 2.....	38
Tabel 3.....	39
Tabel 4.....	39
Tabel 5	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan secara bertahap dan terus-menerus guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dalam proses pembangunan, peran perempuan adalah salah satu bagian penting dan tak dapat dipisahkan terlebih dalam lingkungan sosial masyarakat, termasuk masyarakat desa. Pada dasarnya kaum perempuan juga memiliki kapasitas yang setara dengan kaum laki-laki dalam berkontribusi melaksanakan pembangunan masyarakat. Saat ini peran perempuan sebagai legislator dan pembuat kebijakan di lembaga legislatif dan pemerintahan masih tergolong minim, yang menyebabkan keberadaan perempuan belum terlalu dipertimbangkan (Candra Sitorus, 2015).

Kehadiran perempuan sebenarnya mampu meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik dan untuk menyampaikan harapan atau keinginan serta kepentingan kaum perempuan yang selama ini dirasa belum sepenuhnya terakomodasi (UNDP, 2010). Jumlah perempuan yang berada dalam posisi sebagai pengambil keputusan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif juga tergolong sedikit. Rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik dikarenakan mereka masih menganggap bahwa politik ialah dunianya kaum laki-laki, dan juga masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat umum yang menganggap perempuan tidak pantas berada di arena politik. Secara umum ada 3 faktor utama dari rendahnya perempuan memasuki dan aktif dalam politik, yaitu hambatan secara *struktural*, *kultural*, maupun *individual* dari perempuan itu sendiri (Dona, 2015). Kurangnya representasi perempuan ini tidak hanya merugikan kaum perempuan itu sendiri, akan tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian dan keawatiran perempuan tentang kesehatan, kesejahteraan, anti kekerasan, pendidikan dan isu-isu lingkungan, tidak dapat menjadi suatu kebijakan yang sesuai jika mereka

tidak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kepedulian dan pengalaman hidup seorang perempuan yang khas mengharuskannya untuk memperjuangkan sendiri apa yang mereka inginkan (AM, 2014).

Hal ini perlu adanya penyadaran dan meningkatkan pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan serta kesadaran bagi perempuan akan hak dan kewajibannya dalam bidang politik. Serta perlu adanya peningkatan berbagai upaya aksi afirmasi untuk meningkatkan kualitas perempuan dan memperbaiki regulasi yang menghambat mereka (Ardiansa, 2017). Salah satu cara untuk meningkatkan representatif perempuan adalah dengan memberdayakan politik perempuan. Pemberdayaan adalah sesuatu yang muncul dalam pendekatan pembangunan ketika masyarakat yang terpinggirkan secara sosial membutuhkan pendampingan dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik dalam konteks kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensialitas warga dalam rangka mobilisasi semangat berpartisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berpengaruh terhadap kehidupannya dan mengimplementasikan keputusan tersebut (Zubaedi, 2014). Pada awalnya istilah pemberdayaan atau *empowerment* di Indonesia dilakukan untuk memperkuat masyarakat lemah dan rentan secara ekonomi, sosial dan politik agar mereka mampu berubah dan membenahi posisinya ketika menghadapi kelompok yang lebih kuat secara sosial. Inti dari pemberdayaan sendiri yaitu masyarakat tertentu yang terpinggirkan memiliki posisi tawar sehingga mereka akan berperan secara aktif serta partisipatif dalam pembangunan dan bukan sekedar hanya menjadi objek pembangunan.

Upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) pada umumnya mencakup tiga kegiatan penting. Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dan memihak kepada masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk

pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, ialah menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif, pemberdayaan Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Zubaedi, 2013). Dalam proses pemberdayaan yang sering menjadi objek pemberdayaan adalah masyarakat pedesaan. Pasalnya masyarakat desa sering dianggap sekelompok orang yang masih tradisional, apatis akan hal-hal diluar pribadi, pendidikan rendah, primitif serta minim kesejahteraan. Kemudian rata-rata masyarakat desa masih mengandalkan alam untuk kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan dalam pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik menjadi pendekatan yang populer yang dilakukan oleh pemerintah, parpol dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan disetiap daerah tentunya berbeda-beda, karena suatu program harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan, potensi alam, dan kebutuhan masyarakatnya. Meskipun pemberdayaan dalam bidang politik menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah dan partai politik akan tetapi juga diperlukan peran dari *civil society*. Salah satunya ialah Lembaga swadaya masyarakat (LSM), LSM memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam memberdayakan dan membela atau mengawal permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masyarakat dan program yang lemah. Menurut Hikam, kemampuan LSM adalah untuk memperkuat masyarakat bawah melalui sebuah kegiatan penyadaran, pendampingan, dukungan, pembelaan, serta menyebarluaskan pelaksanaan program kepada masyarakat agar negara memenuhi hak-hak dasarnya (Hikam M. , 1999). LSM memiliki peranan penting di dalam struktur kemasyarakatan, sehingga LSM harus berperan dengan baik guna berjalannya struktur sosial masyarakat secara menyeluruh. Dengan

berjalannya fungsi LSM terkait pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Jika demikian halnya, lembaga swadaya masyarakat atau LSM memberikan kesadaran yang lebih besar akan nilai kemanusiaan yang berjalan seiring dengan proses pembangunan. Disisi lain, kedekatan lembaga swadaya masyarakat telah menjadi satu kekuatan sosial dan politik yang sangat memungkinkan proses pembangunan berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam proporsi yang seharusnya. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat juga mampu menciptakan keselarasan antara pemerintah, pelaksana pembangunan dan lembaga swadaya lainnya yang berada pada jalan dan tujuan yang sama walaupun menggunakan cara yang berbeda. Selama ini Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya memberdayakan kaum perempuan salah satunya dengan berbagai ketentuan hukum (Mansour, 1996).

Diskusi mengenai politik perempuan, Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan partisipasi politik perempuan cukup rendah, dimana mayoritas masyarakatnya masih menganggap jika politik ialah dunia laki-laki dan perempuan masih dianggap kurang pantas untuk terjun ke dunia politik. Dalam pemilu legislatif sendiri pada tahun 2009 keterpilihan perempuan hanya berjumlah 5 orang saja, dan pada 2019 keterpilihan perempuan dalam pemilu meningkat menjadi 10 orang. Namun jika diprosentasekan baru mencapai 22% keterwakilan perempuan (<http://repository.umi.ac.id>). Tentu hal ini masih terlampau jauh dari calon laki-laki, jadi masih perlu ditingkatkan upaya berbagai tindakan korektif untuk meningkatkan kualitas perempuan. Fakta empirik menunjukkan bahwa politik di Kabupaten Gunung Kidul selalu didominasi oleh kaum laki-laki dan perempuan sering hanya sebagai figuran dalam kehidupan.

Berdasarkan kajian keterwakilan perempuan di ranah kabupaten dari tahun ketahun memang sudah baik, namun masih belum sesuai harapan. Hal

ini juga didasari karena kurangnya kapasitas dari calon perempuan itu sendiri, apabila calon perempuan memiliki kapasitas yang mumpuni tentu mereka akan mampu untuk meyakini pemilih dan ketika telah menduduki jabatan politik dalam pengambilan kebijakan harus mampu menjadi mitra yang setara bagi laki-laki. Hal ini dirasa masih banyaknya parpol yang mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi syarat kuota 30%. Ketidakseriusan partai politik juga ditunjukkan dalam menempatkan perempuan pada nomer urut daftar calon.

Fenomena tersebut menjadi tugas berat bagi LSM dan aktivis-aktivis perempuan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap kaum perempuan, karena mereka harus mampu menghilangkan struktur sosial berupa mitos, prasangka, citra diri serta pelabelan negatif yang melemahkan, membebani dan merugikan keberadaan kaum perempuan. Jadi sebuah perjuangan yang secara komprehensif ini harus terus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh kaum perempuan dan seluruh elemen masyarakat (Pramudianto, 1999).

Lembaga swadaya masyarakat merupakan suatu peluang yang sangat baik dalam upaya pemberdayaan perempuan desa dalam konteks politik. LSM Yayasan Satu Karsa Karya merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang independen dan tidak berhubungan atau terikat secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintah, parpol, agama, suku dan kelompok tertentu. YSKK memiliki fokus kerja pada pemberdayaan perempuan dan anak dan didirikan pada tanggal 12 Mei 2001 di kota Surakarta provinsi Jawa Tengah yang dipelopori oleh sekelompok aktivis pemberdayaan masyarakat yang telah bertahun-tahun berkecimpung diberbagai organisasi masyarakat sipil (yskk, 2019)

LSM Yayasan satu Karsa Karya (YSKK) sendiri melalui bidang pemberdayaan perempuan dan anak mengadakan program pendampingan pemberdayaan atau penguatan peran perempuan dalam politik di 8 desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, salah satunya yaitu desa Watusigar kecamatan Ngawen. Sehingga mulai ada peningkatan partisipasi perempuan

dalam pemilu dan politik lokal di tingkat desa. Pada tahun 2020 atau setelah terlaksanakannya program, jumlah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan desa mengalami peningkatan yang mana kini sebanyak 9 perempuan berada pada pemerintah desa. Selain itu meningkatnya partisipasi dalam pemilu, keikutsertaan dalam musrembangdes, organisasi keperempuanan mulai aktif dan memiliki program yang jelas serta perempuan-perempuan desa pada umumnya juga mengalami peningkatan keberanian dalam berbicara. Oleh karenanya kebutuhan perempuan secara perlahan mulai diperhatikan dan terpenuhi. Hal ini berbanding terbalik dengan sebelum adanya pemberdayaan yang mana di desa Watusigar terdapat masalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dan forum-forum rapat warga desa, hal ini dikarenakan faktor sosial budaya yang memandang perempuan tidak pantas memimpin, lemahnya mentalitas perempuan, minimnya informasi, kurangnya kapasitas dan kepedulian warga, serta permasalahan kapasitas aparatur desa yang kurang memahami tatakelola desa (YSKK, 2019). Masih banyak dari aparat desa yang kurang memahami bagaimana melibatkan perempuan dalam forum, padahal jelas undang-undang desa telah mengatur tentang pengalokasian dana hibah pemerintah, pemberdayaan warga desa agar ikut serta dalam mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam dinamika politik (<http://watusigar.gunungkidulkab.go.id>).

Oleh karenanya, penulis berkeinginan untuk melihat bagaimana upaya Yayasan Satu Karsa Karya dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan desa di Watusigar, Gunung Kidul, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan judul “PERAN YAYASAN SATU KARSA KARYA SURAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DESA (Study Kasus Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat dua pertanyaan utama yang akan menjadi pemandu skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peran LSM Yayasan Satu Karsa Karya dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan desa di Gunung Kidul, Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemberdayaan politik perempuan desa di Gunung Kidul, Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran LSM Yayasan Satu Karsa Karya dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan politik perempuan desa di Gunung Kidul, Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Tugas LSM dalam ranah politik mampu menjadi suatu kekuatan yang dapat mendorong terjadinya perubahan, terkhusus pada suatu kebijakan. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai pemberdayaan politik perempuan khususnya di pedesaan
 - b. Penelitian ini secara teoritis memberikan gambaran bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberdayakan perempuan dalam politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dan wawasan khususnya bagi peneliti, umumnya bagi

masyarakat tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberdayaan politik perempuan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemberdayaan telah banyak dilakukan sebelumnya. Antaranya ialah penelitian Candra Sitorus pada 2015 yang berjudul Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) koalisi perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam pemberdayaan politik perempuan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa KPI Kota Semarang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan, dengan melakukan pelatihan serta pendampingan untuk berpartisipasi dalam membangun kemandirian. Di sini KPI Kota Semarang berperan menjadi tempat untuk belajar serta memotivator kaum perempuan guna meningkatkan pengetahuan terkait cara dan bentuk organisasi dan politik. Sedangkan factor-faktor yang mendukung pemberdayaan perempuan di Semarang adalah adanya kerja sama yang baik antara pengurus lembaga swadaya masyarakat dengan masyarakat binaan, serta adanya dukungan dari stakeholders terkait dan organisasi swasta lainnya (Sitorus, 2015).

Kedua yaitu penelitian dari Stephanus Pelor dan Ina Heliany pada 2018 dengan judul peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya distorsi pada peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dalam melakukan pemberdayaan, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti adanya motif mencari untung, latar belakang profesi aktivis yang beranekarragam, rendahnya profesionalisme, minimnya sumber dana, konsep idelogi yang tidak jelas dan aturan yang terlalu longgar. Akibatnya, fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pilar masyarakat sipil harus dipulihkan, yang dapat dilakukan dengan reposisi internal dan eksternal (Pelor, 2018).

Selanjutnya terdapat penelitian dari Kiromim Baroroh pada 2009 dengan judul peran lembaga swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan melalui pelatihan *life skill*. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta (LAPY) dalam melakukan pemberdayaan perekonomian perempuan dan faktor pendukung serta penghambat pemberdayaan perempuan program *life skill* menjahit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberdayakan perekonomian perempuan melalui *life skill* LAPY berperan sebagai fasilitator dan motifator, sedangkan pemberdayaannya dilakukan dengan cara melatih dan pendampingan dalam menjahit hingga pemagangan serta pemberian modal usaha (Baroroh, 2009).

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Lifda Khoirunnisa pada (2014) dengan judul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pasca Pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PLTU Tanjung Jati berdampak positif dan negatif. Masyarakat juga terkena dampak kerusakan lingkungan akibat beroperasinya PLTU Tanjung Jati B. Dalam hal ini tentunya Lembaga Swadaya Masyarakat berperan besar dan berkontribusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat di desa Tubanan dinilai aktif. Namun, perlu adanya pembenahan dalam hal pengawasan terhadap LSM. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan pemerintah desa dalam hal penyelesaian suatu kasus (Khoirunnisa, 2014).

Selanjutnya penelitian Ari Ganjar Herdiansah, Randi (2016) dengan judul penelitian Peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM dan Ormas merupakan wujud berkelanjutan dari civil society yang fungsinya untuk memperjuangkan, menghubungkan, serta membela kepentingan masyarakat dari dominasi

kepentingan modal dan politik nyata. Dengan kekuatan kolektivitas, kapasitas, serta pengorganisasian massa. LSM dan Ormas berperan sebagai pengawas sekaligus aktor dalam kebijakan dan program pembangunan demi kepentingan publik (Randi, 2016).

Selanjutnya penelitian Komara Saputra (2019) meneliti tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik, Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan dalam politik oleh DPD Partai Demokrat Lampung dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung adalah rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan kader, dan memberikan dukungan administrasi. Faktor pendukung pemberdayaan perempuan adalah adanya dukungan dari Pemerintah Lampung, adanya dukungan dari Organisasi-organisasi perempuan yang mendukung, serta kekompakan internal Partai Demokrat. Faktor penghambatnya adalah kurangnya minat perempuan berpolitik, kurangnya pemahaman perempuan terkait politik (Saputra, 2020).

Selanjutnya penelitian dari Jein Hilda Palandung, Daud Liando dan Stefanus Sampe (2018) meneliti tentang Pemberdayaan Politik Perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pemangku kepentingan (penyelenggara, partai politik, dan pemerintah daerah) telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Hal ini dibuktikan dari telah tercapainya minimal kuota kaum perempuan yang terlibat dalam politik praktik, berdasarkan dari jumlah presentasi kaum perempuan yang menjadi anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah mencapai 35%, namun pada kenyataannya semua itu belumlah optimal jika ditinjau dari semangat emansipasi perempuan yang mengupayakan

kesetaraan gender pada segala aspek kehidupan khususnya pada bidang politik, hal ini terbukti dengan masih adanya kaum perempuan yang sama sekali belum diberdayakan (Palandung, 2018).

Selanjutnya penelitian Komang Eva Oktapiani, Bandiyah, Mirah Mahaswari (2020) meneliti tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Partai Politik di Provinsi Bali (Studi Pada Partai PDIP, Demokrat dan PSI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menyajikan gambaran terkait pemberdayaan perempuan di partai PDIP, Demokrat dan PSI di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan oleh PDIP terlihat pada anggaran dasar pada pasal 30 ayat 3. Pada Partai Demokrat terlihat pada program yang mengedepankan perempuan dan membentuk organisasi sayap dengan nama srikandi demokrat. Sedangkan pada PSI dapat dilihat pada anggaran dasar bab XIII pasal 26. Pada intinya seluruh partai telah menerapkan beberapa strategi pemberdayaan perempuan, namun implementasinya belum berjalan maksimal karena dominasi masih kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap laki-laki, perlu pemahaman bahwa perempuan juga bisa memperjuangkan hak yang sama (Oktapiani, 2020).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada metode dan tema penelitian dimana sama-sama membahas tentang peran dan pemberdayaan perempuan dalam dunia politik, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitiannya yang mana dalam penelitian ini meneliti tentang pemberdayaan politik perempuan desa oleh LSM di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta oleh lembaga swadaya masyarakat Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta dan fokus pada proses yang dilakukan serta faktor yang mempengaruhi pemberdayaan itu terjadi. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan untuk mengetahui LSM tersebut dalam melakukan pemberdayaan perempuan di arena politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang penulis gunakan untuk pengumpulan data dan nantinya digunakan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan fenomena sosial yang tengah diteliti (Somantri, 2005). Penelitian ini adalah penelitian lapangan, jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Lexy J. Moloeng penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mencoba untuk lebih memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, motivasi, tindakan, persepsi. Sedangkan studi kasus menurut Faisal yaitu penelaahnya kepada studi kasus yang dilakukan secara intens, mendetail serta komprehensif (Faisal, 1999). Dalam penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan politik perempuan di desa Watusigar, Kabupaten Gunung Kidul oleh LSM YSKK.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian sumber data adalah subjek dari mana data didapat. Jika wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data maka sumber datanya disebut informan, jika menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerakan, atau proses sesuatu fenomena dan jika menggunakan dokumen maka sumber datanya berupa dokumen terkait atau catatan penggunaan (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan sebagai sumber data. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan dengan tambahan data-data berupa dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun organisasi yang membantu memperkuat penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari informan berupa wawancara mendalam terkait peran serta faktor yang mempengaruhi pemberdayaan politik oleh LSM Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta

dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di desa Watusigar, Gunung Kidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini, antara lain media massa, media cetak, buku, majalah, jurnal atau artikel di jejaring social yang mendukung dan selaras dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah bagaimana dan cara apa saja yang diperlukan dalam mendapatkan informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data yang berupa buku, majalah, catatan, agenda, transkrip, koran, prasasti, notulen rapat, legger dan sejenisnya (Arikunto, 2002). Penulis mengumpulkan data dan informasi dalam dokumentasi ini dengan menelusuri dokumen-dokumen yang masih berkaitan dalam penelitian ini yaitu tentang rincian kegiatan, foto serta profil desa Watusigar dan LSM Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan bahan keterangan yang dilakukan melalui proses tanya jawab antar peneliti dan informan. Penulis juga melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa narasumber yang relevan, dalam hal ini yaitu ketua divisi pemberdayaan perempuan LSM Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta dan beberapa masyarakat Desa Watusigar Kabupaten Gunung Kidul yang terlibat dalam pemberdayaan politik perempuan seperti pengurus PKK,

pengurus koperasi wanita dan anggota BPD guna menambah kedalaman informasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dimana lebih banyak pada uraian-uraian hasil wawancara dan dokumentasi. Data-data yang dihasilkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Data penelitian ini dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data-data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2014).

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah sebuah proses memilih dan memilah data, memusatkan perhatian, menyederhanakan data, pengabstrakan dan transformasi data-data mentah dari catatan di lapangan yang terkait dengan penelitian. Prosesnya dilakukan mulai dari pengumpulan data dilakukan dengan cara meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya dengan tujuan menyisihkan data informasi yang tidak relevan dan kemudian diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan untuk menggabungkan informasi-informasi yang terstruktur dan padu serta mudah untuk dipahami. Data disajikan dengan menyusun data menjadi naratif-deskriptif, matrik, bagan,

jaringan, tabel dan format lainnya. Hal tersebut memudahkan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan dan membuatnya lebih mungkin untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupaa kegiatan menemukan makna data yang telah disajikan atau interpretasi. Kesimpulan dapat dilihat sebagai implikasi dari data yang diuji, kekokohan, kebenaran dan kesesuaian, yaitu merupakan validitasnya, validitas inilah yang penulis gunakan untuk merumuskan saran dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing babnya mempunyai titik berat yang berbeda, namun mempunyai korelasi dan saling melengkapi.

Bab satu. Berisi pendahuluan yang di dalam terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua. Kerangka teori, di dalam kerangka teori membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya mengenai pemberdayaan politik perempuan.

Bab tiga. Menjelaskan gambaran secara umum obyek penelitian. Antara lain memuat kondisi geografis, sosial budaya, demografis dan profil lembaga (sejarah, visi misi, struktur organisasi, program kerja, dan lain-lain). Dalam bab ini sepenuhnya mendeskripsikan mengenai obyek penelitian dalam hal ini adalah LSM Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta.

Bab empat. Memuat analisis data penelitian yang berisi deskripsi atau penjelasan yang logis yang dihasilkan dari temuan-temuan dilapangan yang akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Maka disini berisi penjabaran analisis mendalam dan spesifik mengenai peran Yayasan Satu Karya Karsa

dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di desa Karangmojo, Gunung Kidul.

Bab kelima. Dalam bab ini berisi penjabaran analisis mendalam dan spesifik mengenai faktor yang mempengaruhi pemberdayaan politik perempuan di desa Karangmojo, Gunung Kidul.

Bab keenam. Berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai analisis data penelitian yang sudah di korelasikan antara data teoritik dan empirik. Sedangkan saran merupakan masukan penelitian untuk berbagai pihak.

BAB II

PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN

A. PERAN LSM

Menurut Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah atau organisasi/asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara yang mana menjadi perwujudan dari civil society (ICCE, 2000).

Bastian merangkum pendapat Ismail Hadad tentang peran LSM berdasarkan fungsinya, yaitu (Bastian, 2011) :

1. LSM berfungsi untuk menggali potensi, motivasi, tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
2. LSM berperan sebagai komunikator untuk mengamati, mencatat dan mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta pemantauan terhadap proses pelaksanaan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan program serta menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program pembangunan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk memahaminya.
3. LSM sebagai dinamisator yang mengembangkan berbagai strategi dan berinovasi serta mengelola organisasi yang masih asing bagi masyarakat.
4. LSM sebagai fasilitator, dengan kata lain memberi bantuan teknis untuk melaksanakan program-program, diantaranya menyediakan dana, peralatan, modal kerja, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. PEMBERDAYAAN POLITIK

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata ‘power’ yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Oleh karena itu, gagasan utama pemberdayaan selalu berkaitan dengan konsep kekuasaan. Menurut Zubaedi kekuasaan kerap kali dikaitkan dengan kemampuan untuk mendorong orang lain melakukan suatu keinginan kita, terlepas dari keinginan dan kepentingan mereka sendiri (Suharto E. , 2014).

Secara harfiah, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan terhadap masyarakat rentan. Namun, hal paling penting dalam sebuah proses pemberdayaan yakni menciptakan kesadaran. Masyarakat yang sadar dalam hal ini yaitu masyarakat yang mengerti dan bertanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya (Soetomo, 2011).

Pemberdayaan menurut Jim Ife adalah memberikan sumber daya, peluang, keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep utama, yaitu konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan/ketidaksetaraan). Jadi, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif, yaitu (Zubaedi, 2013) :

1. Pemberdayaan, menurut Pluralis, adalah proses yang membantu individu dan bagian masyarakat yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dengan mengajarkan masyarakat bagaimana menggunakan keterampilan melobi, bagaimana menggunakan media politik, dan bagaimana memahami bagaimana sistem (aturan mainnya) bekerja. Alhasil,

pemberdayaan dicapai melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk bersaing secara sehat, tanpa ada yang menang atau kalah.

2. Pemberdayaan, menurut Elitists, adalah upaya untuk mempengaruhi kelompok elit, seperti pemuka atau tokoh masyarakat, penguasa, pejabat dan orang kaya, dengan menciptakan hubungan dengan mereka atau melakukan konfrontasi serta menuntut perubahan. Upaya ini dilakukan dengan pemahaman bahwa masyarakat telah menjadi tidak berdaya sebagai akibat dari kekuasaan dan kontrol elit yang luar biasa.
3. Pemberdayaan, menurut Strukturalis, memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembebasan yang membutuhkan reformasi struktural mendasar dan penghapusan penindasan struktural.
4. Pemberdayaan, menurut post-strukturalis, adalah upaya memodifikasi wacana, yang menekankan sisi intelektual di atas tindakan atau praksis. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai langkah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang evolusi pemikiran inovatif dan analitis. Pemberdayaan menitikberatkan pada komponen pendidikan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pernyataan mengenai pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok kuat terhadap kelompok lemah melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan ketrampilan, pengetahuan, penguatan kemampuan dan dukungan potensi yang mampu menciptakan kemandirian, serta keberdayaan masyarakat dalam segala aspek, seperti sosial politik, ekonomi, dan pendidikan yang dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.

2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif, stimulan dan terus menerus sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah. Menurut Ndraha, terdapat berbagai macam bentuk program pemberdayaan, (Ndraha Taliziduhu, 2003) diantaranya:

- 1) Pemberdayaan Politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (bargaining position) yang diperintah terhadap pemerintahnya. Hal ini dimaksudkan agar yang diperintah memperoleh apa yang telah menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
- 2) Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (human investmen) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan perakuan yang adil terhadap manusia.
- 3) Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.
- 4) Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah agar berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan dampak kerusakan lingkungan.

3. Tahap Pemberdayaan

Sulistiyani mengatakan dalam melaksanakan sebuah pemberdayaan akan dilakukan secara bertahap. Dia mengklaim ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu (Sulistiyani, 2004) :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang mengarah pada perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat berperan dalam bermasyarakat.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan kemampuan sehingga memunculkan inisiatif serta kemampuan yang mengarah pada kemandirian.

4. Strategi Pemberdayaan

Menurut Parson et.al., proses pemberdayaan biasanya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada bukti bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam hubungan satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam pengaturan bantuan perseorangan. Meskipun pemberdayaan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah metode pemberdayaan yang utama. Namun, kolektivitas juga tidak dapat digunakan untuk melakukan semua intervensi pekerjaan sosial. Taktik pemberdayaan individu dapat digunakan dalam beberapa kasus, akan tetapi taktik tersebut masih terkait dengan kolektivitas dalam arti menghubungkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar diri mereka. Dalam bidang pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau dimensi, yaitu (Suharto E. , 2010):

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, kritis intervention. Tujuan utamanya yaitu membimbing dan melatih klien dalam melakukan tugas sehari-hari mereka. Model seperti ini kerap disebut sebagai pendekatan yang terpusat pada tugas (*task centered aproach*).

- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang. Penggunaan kelompok sebagai media intervensi digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok kerap digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan karakter pribadi seseorang agar mereka memiliki kemampuan mengatasi masalah yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini biasa disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena tujuan perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih besar. Beberapa strategi dalam pendekatan ini adalah perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, lobbying, pengorganisasian masyarakat, aksi sosial, manajemen konflik. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai seseorang yang mampu memahami situasi mereka sendiri dan dapat memilih serta menentukan strategi tindakan yang tepat.

Sedangkan itu Jim Ife mengatakan ada tiga strategi yang bisa digunakan untuk memberdayaan masyarakat, antara lain yaitu (Zubaedi, 2013):

1. Perencanaan dan kebijakan (*Policy and planning*)

Untuk mengembangkan perubahan struktur serta kelembagaan sehingga memungkinkan masyarakat mengakses beragam sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Perencanaan dan kebijakan yang tepat dapat dirancang untuk menyediakan sumber mata pencaharian yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan. Misalnya, kebijakan tersebut menciptakan banyak membuka peluang kerja yang luas, dan upah minimum yang tinggi (*poverty* dan pengangguran).

2. Aksi sosial dan politik (*social dan political action*)

Dimaksudkan agar sistem politik yang tertutup dapat dirubah untuk memungkinkan setiap warga negara terlibat dalam proses politik.

Prevalensi keterlibatan masyarakat secara politik menciptakan peluang untuk mencapai kondisi keberdayaan.

3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan

Individu atau kelompok masyarakat tertentu kerap kali tidak menyadari penindasan yang mereka alami. Kondisi ketertindasan diperparah dengan kurangnya kemampuan untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, meningkatkan kesadaran serta pendidikan masyarakat sangat diperlukan. misalnya membekali anggota masyarakat dengan pemahaman tentang bagaimana struktur penindasan terjadi, serta alat dan keterampilan yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan yang efektif.

5. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan ialah untuk memperkuat kekuasaan kelompok individu yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, baik karena faktor internal maupun eksternal seperti yang terjadi karena adanya ketidakadilan pada struktur sosial (Soekanto S. , 1997).

Menurut Edi Suharto pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, terlebih pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan, diantaranya (Suharto E. , 2014) :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan. Seperti halnya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari kelaparan, dan kebebasan dari rasa sakit.
- 2) Menjangkau segala sumber produktif, yang mana dapat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan, sehingga mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan.
- 3) Terlibat pada segala keputusan dan proses pembangunan yang berdampak kepada mereka.

Menurut Nugroho tujuan utama dalam pemberdayaan perempuan yaitu (Nugroho, 2008):

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif (sebagai subyek) dalam program pembangunan, agar tidak sekedar sebagai objek pembangunan seperti yang selama ini ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan pada posisi kepemimpinan, untuk memperkuat daya negosiasi dan keterlibatannya dalam semua aspek pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksana, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk mengelola usaha rumah tangga, industri kecil dan industri besar untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkatkan sekaligus membuka peluang kerja yang produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

6. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dapat berhasil jika didukung oleh komunikasi dua arah. Sumber daya manusia merupakan aspek pendukung lainnya, dengan keyakinan bahwa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki, serta nilai-nilai yang diterima oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kegiatan, akan mempengaruhi keberhasilan program. Terdapat tiga aspek yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu; Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan mampu menghasilkan implementasi yang baik. Konsistensi, pedoman yang diberikan dalam pelaksanaan surat menyurat harus konsisten dan jelas. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan dapat berpengaruh pada sumber daya manusia. Tuntutan terhadap sumber daya manusia dan kegiatan yang dilakukan dapat

mendorong keberhasilan dan dapat membuat organisasi/asosiasi kompetitif dalam hal kegunaan, kualitas dan administrasi. Disamping itu, yang mempengaruhi keberhasilan eksekusi program adalah konfigurasi. Disposisi atau sikap dan penyelenggaraan strategi adalah aspek penting ketiga dari kebijakan publik (Daraba, 2015).

7. Indikator Keberdayaan

Pemberdayaan menurut Kieffer yang dikutip Edi Suharto memiliki tiga aspek yaitu, kemampuan sosiopolitik, kerakyatan serta kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui seseorang itu berdaya atau tidak maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan. Sehingga ketika program pemberdayaan diberikan, maka segala usaha difokuskan pada seluruh aspek dari target perubahan itu sendiri, seperti pada keluarga kurang mampu yang perlu diberdayakan.

Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, Schuler, Hashemi dan Riley telah mengembangkan indikator pemberdayaan yang disebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Jadi keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan mereka dari segi ekonomi, kultural dan politis, serta kemampuan untuk mengakses manfaat kesejahteraan. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk, kekuasaan dalam, kekuasaan dengan, dan kekuasaan atas. Indikator keberdayaan meliputi (Suharto E. , 2017).

- 1) Kebebasan bergerak, misalnya kemampuan seseorang untuk ke luar rumah. Seperti ke tempat belanja, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, rumah tetangga, bioskop. Jika individu mampu melakukan maka tingkat mobilitas dianggap tinggi.
- 2) Kemampuan untuk membeli kebutuhan kecil, seperti mampu untuk membeli barang kebutuhan pokok keluarga (beras, bahan lauk, gula, minyak goreng dan bumbu dapur) dan kebutuhan pribadi (sabun,

sampo, bedak, parfum). Apabila dapat melakukannya maka individu itu dianggap mampu.

- 3) Kemampuan untuk membeli komoditas bernilai besar, seperti membeli barang sekunder maupun tersier. Contoh televisi, HP, kulkas, laptop. Individu itu dianggap mampu terutama jika dibeli menggunakan uang pribadi dan dapat menentukan keputusan tanpa izin orang sekitarnya.
- 4) Berperan dalam membuat keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan keluarga baik secara individu ataupun dengan pasangan. Contoh dalam merenovasi rumah, mendapatkan cicilan usaha, pembelian hewan ternak.
- 5) Kebebasan relatif berasal dari dominasi keluarga, adakah orang yang mencuri uang, kendaraan, tanah, perhiasan tanpa ijinnya, dan yang melarang untuk bekerja di luar rumah atau mempunyai anak.
- 6) Kesadaran akan politik dan hukum, seperti pemilu, mengetahui pejabat pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat setempat, serta paham akan pentingnya buku nikah dan hukum waris.
- 7) Berpartisipasi dalam kampanye atau protes atas ketidaksesuaian kebijakan, jika ia pernah melakukan salah satu atau keduanya maka seorang dianggap telah berdaya, contohnya suami melakukan kekerasan kepada istri, istri yang megabaikan suami atau keluarga, gaji yang tidak sesuai, keputusan yang tidak tepat, penyelewengan bantuan sosial.
- 8) Jaminan ekonomi serta kontribusi kepada keluarga, kepemilikan rumah, tabungan uang, tanah, aset atau harta produktif lainnya. Jika seseorang memilikinya secara pribadi, maka ia dianggap berdaya.

Keberhasilan dalam pemberdayaan lebih menekankan kepada prosesnya dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi untuk membuat masyarakat tertarik dan terlibat aktif dalam proses

pemberdayaan adalah dengan mengikut sertakan mereka dalam tahap perencanaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka merasa memiliki ikatan emosional yang mensukseskan program pemberdayaan (Anwas, 2014).

8. Pemberdayaan Politik Perempuan

Pemberdayaan politik adalah kemampuan menganalisa, mengatur dan memobilisasi dirinya agar dapat berubah secara positif ((ODI, 2009). Sedangkan pemberdayaan perempuan adalah upaya pempangan kaum perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, sosial, politik, dan budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya dan meningkatkan rasa percaya diri untuk dapat berperan serta berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, Pemberdayaan perempuan tidak hanya berarti memaksimalkan potensi mereka, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan kemampuan mereka untuk bertindak dalam mengubah suasana politik ke arah yang lebih sehat, menyeluruh dan etis. pemberdayaan politik perempuan harus fokus pada kemampuannya untuk menyadari perlunya emansipasi perempuan dalam menghadapi marginalisasi politik agar memiliki identitas yang kuat dalam tindakan politiknya (Soeharto, 2011).

Menurut Ndraha Pemberdayaan politik dilakukan guna meningkatkan daya tawar (bargaining position) antara yang diperintah dengan pemerintahnya. Bargaining bertujuan agar yang diperintah memperoleh haknya berupa layanan, barang, jasa, dan perhatian tanpa merugikan pihak lain. Political Empowerment atau pemberdayaan politik sebenarnya lebih mengacu kepada perempuan (Ndraha, 2003).

Menurut *World Bank* pemberdayaan perempuan merupakan sebuah konsep multifaset dan biasanya didefinisikan seperti hak, suara, dan sumber daya. Pada pemberdayaan politik ini, perempuan didorong untuk memiliki partisipasi penuh diseluruh fase pembuatan kebijakan,

implementasi serta evaluasi dan semua tahap pada pengambilan kebijakan publik dan pribadi dengan menggunakan hak dan suaranya. Karena peran wanita di ranah publik, khususnya politik sangat diperlukan terutama pada pelayanan publik yang esensial seperti kesehatan dan pendidikan agar menguntungkan semua pihak. Selain itu perempuan di ruang publik juga diperlukan untuk meningkatkan sistem peradilan untuk menjamin perlindungan hukum yang sama dan setara serta akan membantu menekan perilaku kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Sehingga pada pengambilan keputusan politik, baik untuk negara ataupun masyarakat perlu bagi perempuan diwakili oleh sesamanya dengan akses yang setara dengan laki-laki (<http://www.academia.edu>).

Pemberdayaan perempuan dimulai dengan tidak membiarkan mereka bodoh dan dibodohi. Perempuan berusaha diberi akses untuk mendapatkan informasi serta disadarkan bahwa konstruksi budaya patriarki telah meletakkan posisi yang lemah baginya. Berbagai pembenaran diciptakan untuk melestarikan posisi tersebut. Oleh karena itu untuk tidak membiarkan perempuan ketinggalan informasi, penyadaran gender perlu dipromosikan, karena ideologi gender yang mempunyai akibat ketidakadilan gender telah banyak merugikan perempuan (Rosana, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran dan meningkatkan pemahaman perempuan tentang kesetaraan gender agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan potensinya sehingga mereka dapat mencapai tujuannya, mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah atau organisasi/asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara yang mana menjadi perwujudan dari civil society (ICCE, 2000). Dapat dikatakan bahwa LSM merupakan organisasi masyarakat sipil yang secara independen menjalankan peran penyeimbang serta membantu negara namun tidak berorientasi pada profit dan kekuasaan, sehingga melalui aktivitas pelayanan dan pemberdayaannya dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Abidin dan Rukmini memberikan pendapat secara sederhana mengenai karakteristik LSM, (Rukmini, 2004) yakni:

- a) LSM berdiri atas asas suka rela.
- b) LSM adalah lembaga non pemerintah dan tidak birokratis.
- c) LSM bekerja untuk melayani masyarakat umum, bukan kepada anggota atau aktivisnya sendiri.
- d) LSM berbeda dengan lembaga usaha. Kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan atau nirlaba.

- a. Tentang LSM YSKK

Gambar 1

Logo Yayasan Satu Karsa Karya



Sumber : <https://www.facebook.com/yskksolo/>

(diunduh pada 4 Desember 2021)

LSM Yayasan satu karsa karya sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil yang independen dan tidak memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah, partai politik, agama, kelompok etnis maupun kelompok lainnya. LSM Yayasan Satu Karsa Karya merupakan Organisasi Masyarakat Sipil yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak. YSKK sendiri didirikan pada tanggal 12 Mei 2001 di kota Surakarta provinsi Jawa Tengah, oleh sekelompok aktivis pemberdayaan masyarakat yang telah lama berkiprah diberbagai organisasi masyarakat sipil lainnya. Yang menjadi alasan utama terbentuknya Yayasan Satu Karsa Karya yaitu karena masih banyaknya masyarakat marginal dan rentan yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, disamping itu faktor semangat gerakan reformasi yang digagas oleh masyarakat sipil dan mahasiswa pada tahun 1998 juga menjadi latar belakang terbentuknya LSM ini. Jadi atas dasar itulah, Yayasan Satu Karsa Karya menetapkan diri sebagai bagian dari pelaku pembangunan bangsa yang kritis dan solutif. YSKK sendiri berkantor di Singopuran Rt.04/II, Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah. 57164 Indonesia.

a. Visi Misi Yayasan Satu Karsa Karya

Visi :

Penggerak perubahan masyarakat menjadi berdaya dan inklusif.

Misi :

1. Memberdayakan perempuan yang rentan dari aspek ekonomi dan politik;
2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan anak usia dini yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan akuntabilitas sosial layanan publik;
4. Mewujudkan lembaga yang kuat dan mandiri.

b. Program Kerja Utama YSKK

1. Pemberdayaan Perempuan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan otonomi ekonomi sosial dan politik perempuan. Penguatan dan Pengembangan Peran Perempuan dalam Politik Pembangunan Desa, serta Pengembangan Kewirausahaan Sosial berbasis perempuan merupakan salah satu upayanya. Yang menjadi kelompok sasaran dari inisiatif ini adalah perempuan, aparat desa (aparat pemerintahan desa, BPD), kader muda TP-PKK desa, karang taruna, koperasi perempuan/kelompok perempuan ekonomi, dan kelompok kepentingan perempuan lainnya di tingkat desa.

2. Pemberdayaan Anak

Program ini berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Pengembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat, Pengembangan Sekolah MANTAP

(Manajemen Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif), dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan melalui Revitalisasi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah salah satu proyek yang sedang dikerjakan. Yang menjadi sasaran program ini yaitu pendidik PAUD, pengelola lembaga PAUD, komite sekolah, dewan pendidikan, kepala sekolah dan guru.

3. Pengelolaan data dan Informasi

Program ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan berbagai produk pengetahuan dan pengalaman Yayasan Satu Karsa Karya dalam inovasi transformasi. Ruang lingkup kegiatannya meliputi Pengembangan Berbagai Produk Pengetahuan (buku, film, poster, lembaran, brosur, buletin) dan Pengelolaan Media Sosial (website, fanspage Facebook, instagram, Twitter). Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah internal YSKK dan eksternal, antara lain masyarakat binaan, pengambil kebijakan, pegiat pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi dan publik secara umum.

Dalam sub program Ism YSKK menggeluti bidang Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Politik Pembangunan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini, Desa MANTAP, Kepemimpinan Perempuan, Revitalisasi Komite Sekolah.

c. Program Lainnya

1. Layanan Konsultasi

Unit Layanan Konsultasi merupakan bagian dari unit kerja Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) yang fokus memberikan layanan untuk membantu berbagai pihak dalam melaksanakan program berbasis pemberdayaan masyarakat. Unit ini bertujuan untuk memberikan data dan membantu para

pelaku pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menciptakan, mengelola, dan mengevaluasi berbagai inisiatif secara efektif dan jangka panjang. Tujuan ini didorong oleh kebutuhan para pelaku pemberdayaan masyarakat untuk mampu merespons dinamika sosial yang tinggi, yang memerlukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dan database yang kuat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kapasitas pelaku pemberdayaan masyarakat yang baik, serta ketersediaan data yang akurat, akan bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani.

2. Layanan Pelatihan

YSKK memberikan beberapa macam pelatihan kepada para pelaku pemberdayaan masyarakat, baik secara reguler maupun atas permintaan pihak ketiga. Individu akan mendapat manfaat dari pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap mereka, sementara organisasi akan mendapat manfaat dari aspek manajemen dan program yang diperkuat. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan hybrid antara Adult Education (POD) dan Appreciative Inquiry. Semangat yang diusung adalah salah satu partisipasi, mengakui berbagai capaian yang telah diraih dan secara kritis meningkatkannya guna membangun masa depan yang lebih baik.

Beberapa kompetensi utama YSKK yaitu :

- Ekonomi lokal dan usaha mikro kecil (UMK)
- Keuangan mikro (Koperasi, LKM, KSM, dll)
- PAUD berbasis masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat berbasis aset
- Advokasi dan perubahan sosial
- Metode pelatihan partisipatif dan appreciative inquiry

- Pembangunan desa partisipatif
- Manajemen sekolah partisipatif
- Metodologi penelitian partisipatif
- Pengembangan organisasi dan program
- Knowledge management dan komunikasi organisasi

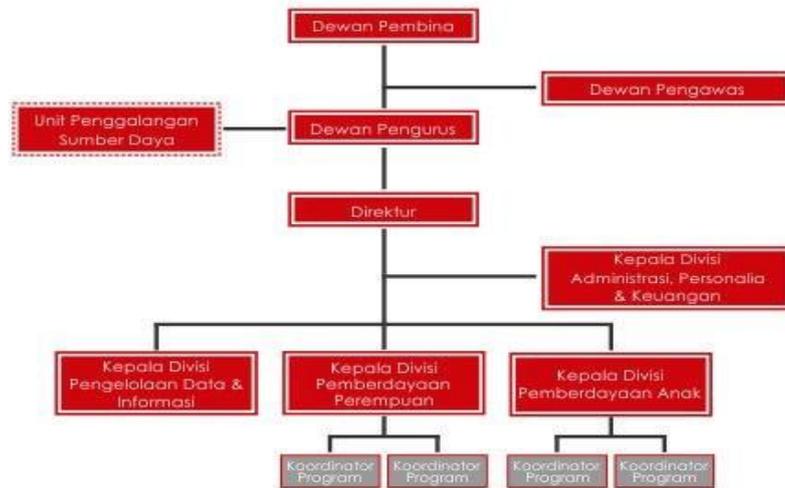
3. Layanan Penelitian

Hal ini bertujuan untuk membantu para pelaku pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh data, informasi, tanggapan dan penilaian dari berbagai sumber terkait untuk digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan, aturan serta regulasi program. Pendekatan penelitian yang digunakan didasarkan pada tindakan partisipatif apresiatif berbasis aset. Beberapa kompetensi utama YSKK yaitu :

- Penilaian kebutuhan (need assessment)
- Pemetaan atau analisis sosial
- Pengumpulan data awal (base line survei)
- Evaluasi program

d. Struktur Organisasi

Berikut adalah bagan struktur organisasi yang ada pada LSM Yayasan Satu Karsa Karya :



Adapun pengurus Organisasi YSKK yaitu:

Tabel 1

Pengurus Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	. Ir. Indrastri Maria Agustiana	Ketua Dewan Pembina
2	Drs. Budhi R Harsono, MBA	Anggota Dewan Pembina
3	Hartono Rakiman, S.Sos	Ketua Pengawas
4	Tutiek Rahayu, S.S	Anggota Dewan Pengawas
5	Sunarti T Santosa, BA	Ketua Dewan Pengurus
6	Dra. Ning Yulastuti	Bendahara Dewan Pengurus
7	Iwan Setiyoko	Direktur Pelaksana

8	Kangsure SUROTO	Koordinator Unit Penggalangan Sumber Daya
9	. Lusiningtyas	Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan
10	Ely Mei Andriyani	Ketua Divisi ADPERKEU
11	Rusita Oktiviana	Pelaksana Divisi ADPERKEU
12	Sri Wahyuni	Program Officer Divisi Pemberdayaan Perempuan
13	Winda Hayuningtyas	Program Officer Divisi Pemberdayaan Perempuan
14	Muh Syaiful Adli	Pelaksana Divisi Pengelolaan Data & Informasi

Sumber : www.yस्कk.org

B. Potret Desa Watusigar

a. Kondisi Geografis dan Topografi desa Watusigar

Desa adalah tempat yang tetap pada masyarakat di daerah pedalaman merupakan wilayah hukum dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan terendah ditingkat. Pemerintahan desa membawahi rakyat secara langsung dan dibawah kekuasaan kecamatan dan terdiri dari dukuh atau dusun. Desa Watusigar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul yang berjarak 5 km dari kantor kecamatan dan 23 km dari pusat pemerintahan kabupaten Gunung kidul. Secara pemerintahan Desa Watusigar sendiri terbagi menjadi 12 padukuhan atau dusun, 12 RW dan 45 RT. 12 dusun tersebut yaitu dusun Buyutan, Cikal, Dungmas, Kepek, Munggur, Ngampon, Ngimbang, Randusari, Sabrang, Sambirejo, Tapansari, Watusigar . Desa Watusigar secara geografis berada di bagian selatan kecamatan Ngawen yang sekaligus berbatasan langsung dengan kecamatan Karangmojo dan merupakan

bagian tenggara dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti umumnya daerah lain di Kabupaten Gunungkidul, Desa Watusigar merupakan daerah yang sebagian besar adalah berupa dataran. Desa Watusigar sendiri berada pada ketinggian 350 mdpl yang berada pada garis Koordinat Bujur : 110.678447 dan Koordinat Lintang : - 7.871875 dengan luas wilayah berkisar 701.4566 Hektar atau setara dengan 15,05% dari luas kecamatan Ngawen sekaligus desa terluas ke lima di wilayah kecamatan tersebut. Luas tersebut dirinci menurut penggunaan lahan yaitu terdiri dari 139,02 Ha berupa sawah, 302,25 Ha berupa tanah kering, 194,94 Ha berupa bangunan, 25,00 berupa hutan, dan 40,25 Ha berupa lainnya. Desa Karangmojo memiliki batas-batas dengan daerah lain sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Beji
- 2) Sebelah Selatan : Desa Jatiayu (Kec. Karangmojo)
- 3) Sebelah Timur : Desa Kalitekuk (Kec. Semin)
- 4) Sebelah Barat : Desa Katongan (Kec. Nglipar)

Gambar 2

Peta Desa Watusigar, Gunung Kidul



Sumber : website watusigar

b. Kondisi Demografi

1) Penduduk

Pada tahun 2020 menurut data BPS Kabupaten Gunung Kidul jumlah penduduk di Desa Watusigar adalah 5 620 jiwa. Agar dapat lebih dipahami dari aspek Desa Watusigar, maka penulis sajikan gambaran kependudukan tersebut sebagai berikut.

a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2

Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase
2.	Anak-anak	953	17,40
3.	Dewasa	3782	66,10
4.	Tua	885	16,50
Total		5620	100,00

Sumber : Badan pusat statistik kabupaten gunungkidul. bps 2021

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1.	Laki-laki	2770	49,57
2.	Perempuan	2850	50,43
Total		5620	100,00

Sumber : Badan pusat statistik kabupaten gunungkidul. bps 2021

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Watusigar berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2770 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 2850 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Karangmojo berdasarkan jenis kelamin lebih banyak.

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penataan dan peningkatan pendidikan pada masyarakat perlu ditingkatkan. Keterlibatan orang tua, sekolah dan masyarakat Desa Watusigar perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pada tabel 4 dibawah ini dapat dilihat komposisi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1.	Tidak/Belum Sekolah	2356	41,92

2.	Tamat SD/Sederajat	745	13,24
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	739	13,14
4.	SMP/Sederajat	946	16,82
5.	SMA/Sederajat	757	13,61
6.	Diploma I-III	42	0,72
7.	Diploma IV/Strata I	33	0,53
8.	Strata II & Strata III	2	0,03
Total		5620	100,00

Sumber : Badan pusat statistik kabupaten gunungkidul. bps 2021

Data pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa pendidikan penduduk desa dapat disimpulkan adanya masyarakat yang tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan Sarjana. Penduduk yang tidak tamat SMA merupakan penduduk yang mayoritas kemudian terdapat penduduk yang tidak/belum sekolah. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa di desa Watusigar masih terdapat penduduk yang belum menyadari pentingnya pendidikan bagi mereka. Kurangnya pengetahuan dan wawasan dapat membuat masyarakat di desa ini kurang mampu berpikir lebih dalam menyeleksi perilaku-perilaku yang baik dan yang buruk untuk dilakukan. orang tuapun dalam hal ini dapat membuat mereka merasa kurang dalam mendidik anaknya karena orang tua sendiri tidak dibekali ilmu pengetahuan sehingga bagaimana mereka memberikan contoh serta pengetahuan yang baik untuk anak mereka.

d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Watusigar disajikan pada tabel 5 dibawah ini. Ada banyak ragam jenis mata pencaharian penduduk di Desa Pekalongan.

Tabel 5

Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1.	Petani	1898	33.83
2.	Karyawan Swasta	578	10.27
3	Belum/tidak bekerja	1302	23.20
6	Buruh Harian Lepas	695	12,27
7	Wiraswasta/pedagang	317	5,42
8	ANS	43	0.45
11	Karyawan Honorer	8	0,44
14	Nelayan/Perikanan	2	0,04
Total		5620	100,00

Sumber : Badan pusat statistik kabupaten gunungkidul. bps 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Watusigar memiliki mata pencaharian menjadi petani yang selanjutnya diikuti oleh buruh harian lepas dan karyawan swasta. Kondisi ini juga didukung dengan masih adanya masyarakat Desa Watusigar yang kurang mementingkan pendidikan. Hal tersebut menjadikan masyarakat Desa Watusigar bekerja sebagai tukang bangunan, tukang batu, tebang, buruh tani dan kebun, sopir yang dimana pekerjaan tersebut tidak lebih memerlukan tenaga yang kuat.

BAB IV

PERAN LSM YAYASAN SATU KARSA KARYA DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI DESA WATUSIGAR, GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

A. Partisipasi Politik Perempuan Desa Watusigar

Partisipasi politik, menurut Surbakti adalah keterlibatan orang-orang biasa (tanpa otoritas) dalam proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik yang dapat mempengaruhi pada kehidupannya. Menurutnya bahwa kegiatan warga negara biasa dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu mempengaruhi isi kebijakan publik dan memilih siapa yang membuat serta melaksanakan keputusan politik (Surbakti, 2010). Diterimanya perspektif perempuan dan partisipasi dalam politik adalah prasyarat pembangunan demokrasi dan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Ballington, 2011). Partisipasi politik perempuan tidak harus dimaknai dengan keterlibatan secara personifikasi perempuan dalam struktur partai politik. Namun juga harus dimaknai dari hal yang sederhana, seperti pada keberanian dalam mengambil keputusan sendiri baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, berani menyampaikan pendapat dalam rangka kebaikan bersama, ikut serta dalam pemilihan umum terlebih sesuai dengan pilihannya sendiri, turut serta dalam pemerintahan mulai dari desa, tergabung dalam kepengurusan partai politik hingga pada turut serta dalam pencalonandirinya dalam pemilihan umum baik sebagai eksekutif maupun legislatif.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun pada kenyataannya, perempuan desa Watusigar kurang diberi kesempatan untuk lebih intens dalam proses sosialisasi, kampanye, dengan alasan rumah

tangga dan karakter perempuan kurang layak, serta masalah keuangan, sehingga banyak perempuan di desa yang kurang aktif dalam memainkan perannya dalam politik. Bagaimana partisipasi politik perempuan di Desa Watusigar dapat dilihat dari beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pemilihan

Pemungutan suara adalah bentuk partisipasi politik yang paling umum dan terkenal di pemerintahan. Baik pemilihan pada tingkat daerah maupun nasional. Dalam kegiatan ini perempuan di Desa Watusigar dinilai kurang baik dalam kegiatan ini. Dan dalam menentukan suaranya banyak diantara mereka masih dipengaruhi oleh keluarga seperti suami dan tak jarang juga masih berdasarkan uang dari calon. Belum maksimalnya partisipasi dalam pemilihan umum dapat dilihat berdasarkan pada pilkada 2015, partisipasi pemilih di desa Watusigar menunjukkan 69,66% menggunakan haknya. Berdasarkan hasil rekapitulasi (C1) perempuan, berdasarkan dtp dari 2311 hanya 1709 menggunakan hak pilihnya (pilkada2015.kpu.go.id).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Lusi selaku ketua divisi pemberdayaan perempuan dan anak LSM YSKK :

“Kalau partisipasi perempuan dalam pemilu masih belum maksimal dan masih tergolong rendah ya dan pengaruh politik uang terhadap pilihan masih tinggi jika dibandingkan dengan tempat lain”

Hal ini diperkuat oleh bu Yarsi salah satu anggota TIFA ketika melakukan wawancara tanggal 10 Desember 2021 dengan mengatakan:

“ Bagaimana masyarakat mau menolak, semua pasti juga bakal nerima pemberian itu kan lumayan tinggal pilih sudah ada yang kasih, kan sekalian buat tambah-tambah pemasukan dirumah”.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Krondo selaku anggota BPD yang mengatakan :

“Kalau seumpama kita tidak menerima bisa-bisa kita dipandang mendukung calon yang lain, jadi memang serba susah disini ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kepedulian masyarakat tentang pemilihan masih kurang. Banyak diantara mereka masih mudah untuk dipengaruhi oleh pihak lain.

2. Kegiatan Organisasi

Kegiatan ini menyangkut partisipasi anggota atau perempuan desa dalam organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan memberdayakan masyarakat serta kaum perempuan. Organisasi perempuan yang ada di desa Watusigar yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KWT (Kelompok Wanita Tani), KOPWA (Koperasi Wanita Tani), dan karawitan. Meskipun sudah sedemikian lebarnya ruang untuk berpartisipasi dalam politik, ternyata perempuan di wilayah ini banyak yang belum terlibat secara aktif. Kalaupun ada yang aktif biasanya adalah orang yang sama di berbagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya kapasitas pengurus, dan juga didasari dari kurang jelasnya kegiatan pkk serta kesibukan sehari-hari perempuan itu sendiri. Dapat diartikan bahwa kurangnya pengetahuan tentang cara berorganisasi dan manfaatnya menjadi faktor utamanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Lusi selaku ketua divisi pemberdayaan perempuan dan anak LSM YSKK :

“Waktu saya hadir pada agenda pertemuan PKK sangat membosankan, ditambah sedikit nya para kader yang hadir, mungkin hanya sekitar 40% yang hadir. Katanya si sedang sibuk di ladang, sehingga para kader tidak bisa datang. Agak pesimis kemudian memang ketika saya melihat peserta yang hadir cukup sedikit. Perempuan pada umumnya juga kurang aktif dan tidak optimal partisipasi pkk diranah publik strategis, sdm pengurus pkk dan organisasi keperempuanan masih terbilang terbatas, kususnya dalam ham pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan perempuan dan anak di tingkat lokal”

Hal ini diperkuat oleh ibu Tarmi salah satu pengurus PKK desa Watusigar ketika melakukan wawancara dengan mengatakan:

“kalau partisipasi dalam PKK bisa dibilang hanya biasa saja, dari jumlah yang ada kalau tidak sibuk mungkin sekitar 70-80% mau hadir dalam pertemuan, kalau ditanya paham atau tidaknya ya setiap orang beda-beda, memang saya lihat banyak yang kurang paham dan asal hadir saja tapi ya tidak semua seperti itu. Kalau dari saya sendiri sedikit-sedikit paham akan fungsi dan tugas pkk”

3. Musyawarah

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga dalam kegiatan untuk berunding atau memperdebatkan isu-isu masyarakat di Negara. Percakapan ini juga mencari solusi lain untuk masalah tersebut dan hasil dari diskusi ini dapat diusulkan atau diterapkan. Pada tingkat desa Musdes atau musyawarah desa adalah acara yang paling terbuka bagi masyarakat, berdasarkan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa forum ini diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat desa. Dalam Pasal 1 Ayat 11 Permendagri No. 66 Tahun 2007: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Artinya, kelompok perempuan sebagai kelompok yang berpotensi terkena dampak hasil musyawarah harus ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Musrenbang.

Namun pada Desa Watusigar unsur masyarakat desa adalah perwakilan yang jarang terlibat terlebih kaum perempuan dan disaat perempuan mendapat akses untuk ikut dalam musyawarah mereka hanya sekedar menghadiri undangan. Partisipasi perempuan yang belum maksimal ini didasari dari faktor internal dan eksternal, seperti masih

lemahnya kemampuan dan kemauan dalam penyampaian pendapat maupun pengambilan keputusan dalam forum umum, secara mayoritas tidak adanya kepedulian terhadap pembangunan dan belum ada pokja yang secara khusus berfungsi untuk mendorong dan melakukan upaya strategis untuk perempuan bergerak di ranah publik strategis. Padahal perempuan merupakan unsur yang wajib terlibat dan harus mampu serta diberi kebebasan dalam berpendapat sesuai dengan kebutuhan kaum dan daerah setempat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Lusi selaku ketua divisi pemberdayaan perempuan dan anak LSM YSKK :

“Karena di desa tersebut ditemukannya suatu permasalahan pemenuhan hak dasar perempuan, misal minimnya prosentase kehadiran perempuan dalam forum musyawarah dan pembangunan, minimnya perwakilan perempuan dalam lembaga desa, meskipun ada perempuan yang hadir tapi jumlahnya sedikit dan ya itu-itu saja gitu. Kami lihat banyak faktornya juga seperti masih lemahnya kemampuan dan kemauan dalam penyampaian pendapat maupun pengambilan keputusan dalam forum umum (baik kecil maupun besar), belum ada pokja yang secara khusus berfungsi untuk mendorong dan melakukan upaya strategis untuk perempuan bergerak di ranah publik strategis, dan secara mayoritas tidak adanya kepedulian terhadap pembangunan yang secara itu akan merugikan mereka-mereka juga.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Krono selaku anggota BPD yang mengatakan :

“Terkadang dari masyarakat sendiri juga malaskalau harus musyawarah mengali pendapat atau usulan, ada yang bilang kalau usulan sebelumnya saja belum terpenuhi la kok sekarang malah suruh usul lagi, ada juga yang bilang orang kaya saya mau ngapain lah. Begitulah masyarakat kalau diajak musyawarah pra musren ”

Hal ini diperkuat oleh ibu Tarmi salah satu pengurus PKK desa Watusigar ketika melakukan wawancara dengan mengatakan:

“disini kalau musyawarah ada pada tingkat dusun ada juga pada tingkat desa, kalau di dusun seringnya ya bapak-bapak kan mereka kepala keluarga, kalau di tingkat desa memang rata-rata bapak-bapak tapi ya kadang ada juga perempuan kaya saya kadang juga hadir”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa memang kurang pedulinya masyarakat terhadap pembangunan.

4. Melakukan Lobi

Kegiatan ini merupakan upaya-upaya dari perorangan atau kelompok-kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pimpinan organisasi politik dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang tidak sesuai dan menyangkut banyak orang. Huntington dan Nelson menyebutkan bentuk kegiatannya yaitu melakukan pemogokan yang tertib atau melakukan demonstrasi (Nelson, 1994). Perempuan di desa Watusigar sendiri dapat dikatakan tidak ada sebuah protes atau demonstrasi atas kebijakan yang dirasa tidak sesuai baik pada ranah desa hingga pemerintah pusat, kurang pemahamannya terhadap dunia politik menjadi salah satu dasar mengapa mereka diam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Tarmi selaku pengurus PKK yang mengatakan :

“Perempuan disini tidak pernah ada yang melakukan protes terhadap kebijakan apapun dan ditingkat apapun, baik secara individu ataupun kelompok. Kalau menurut saya sendiri ya memang tidak ada yang perlu protes”.

. Di daerah hal yang demikian masih kentara dan patut untuk diperkuat dalam melakukan pemberdayaan politik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masih minim dan lemahnya pengetahuan dan peran perempuan dalam politik di Desa Watusigar karena tidak ada dukungan kelompok maupun pokja yang mendorong perempuan untuk berkiprah diranah tersebut , jadi memang harus dilakukan sebuah pemberdayaan politik.

B. Peran Yayasan Satu Karsa Karya dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Desa Watusigar

Peran Yayasan Satu Karsa Karya dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di Desa Watusigar Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan pendapat Ismail Hadad (Bastian, 2011), yaitu :

1. Peran Sebagai Komunikator

Pemberdayaan politik perempuan merupakan suatu keharusan dalam demokrasi. Memajukan tata kelola pemerintahan yang demokratis memerlukan lingkungan yang inklusif dan proses politik yang responsif dan mendorong pemberdayaan perempuan. Perempuan sudah semestinya masuk dalam kancah konstelasi politik yang notabene banyak didominasi oleh pihak laki-laki yang merasa superioritas ketimbang perempuan. Dengan adanya representasi perempuan dalam kancah politik *an sich* dapat menjadi warna baru dalam dialektika dan panggung politik yang banyak dikuasai oleh kaum adam. Dengan keterwakilan perempuan dalam ranah politik dapat memutus stigma negatif bahwa perempuan tidak layak atau pantas masuk dalam panggung politik. Padahal, jika ditelisik lebih mendalam bahwa peran perempuan dalam politik dapat memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya demokrasi yang berkeadilan. Perempuan diharapkan dapat mengimbangi perspektif laki-laki yang selalu dominan dan mampu menyampaikan pandangan secara kritis dan konstruktif didalam arena atau gelanggang politik. Sehingga kebutuhan serta hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan tercipta sensitifitas gender dalam politik itu sendiri.

Di setiap daerah *peran stakeholders* dalam pemberdayaan politik perempuan sudah harus digalakkan dengan merata. Agar perempuan mampu berkiprah dan memberi kontribusi positif di tiap-tiap daerah terutama dalam ranah politik. Memang dalam kenyataan belum banyak sosok perempuan yang dengan inisiatifnya mau berkiprah dalam politik

terutama di desa. Karena mungkin sebagian dari perempuan desa masih anti terhadap ranah kepemimpinan dan birokrasi serta belum memiliki tingkat rasa percaya diri yang tinggi alias masih minder jika disandingkan dengan para pria. Dalam merancang dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan, tentunya mempunyai langkah-langkah dari mulai pengenalan program kepada masyarakat hingga evaluasi. Dan proses tersebut membutuhkan strategi-strategi yang tepat agar dapat sampai kepada masyarakat. Beberapa tahapan yang dilakukan Yayasan Satu Karsa Karya dalam upaya pemberdayaan politik perempuan desa Watusigar yaitu :

a. Diskusi Dan Koordinasi Dengan Pemkab Gunungkidul

Pada tahap awal YSKK berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai Konsep Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP). Dialog yang bertempat di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlangsung selama kurang lebih tiga setengah jam ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Budi Martono, Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda), Anik Indrawati, Kepala sub-Bagian Administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda, Ahsan Jihadan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sity Hidayati, TP PKK Kabupaten, Suryastri Sumedi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Etni Priskila. S, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Sugiyanto, yang kesemuanya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pembantu Bupati Kabupaten Gunungkidul. Fokus pembahasan dalam dialog hari itu adalah mengenai Konsep SKP yang merupakan inisiasi dari Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK). Dimulai dengan pemaparan profil YSKK dan tujuan serta keluaran yang diharapkan dari dialog

tersebut yang disampaikan oleh Direktur YSKK sebelumnya, Suroto. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Konsep SKP oleh Staf Program YSKK, Riyadh sebagai bahan bagi semua peserta dialog. Beberapa konsep berdasarkan riset yang dilakukan tim YSKK dengan metode wawancara/interview, sehingga ada beberapa informan yang wajib kami wawancarai guna mengetahui seberapa besar keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Beberapa informan yang menjadi narasumber dalam riset ini antara lain Kepala Desa terpilih, Mantan Kepala Desa, Panitia penyelenggara Pilkades, Panitia Penyelenggara Pembentukan BPD, BPD lama, Tokoh Masyarakat baik perempuan dan laki-laki, Pemerintah Kecamatan dan calon kepala desa tidak terpilih.

Dalam tanggapannya, mengenai konsep SKP, Sekretaris Daerah, Budi Martono menyampaikan bahwa SKP ini berdimensi pendidikan politik yang tentunya sangat positif bagi pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, ia juga menyoroti mengenai modul dan kurikulum SKP yang menurutnya haruslah ditambahkan dengan dimensi kebudayaan, agar tidak berlawanan dengan kearifan lokal. Suroto, Direktur YSKK menyambut dengan baik respon positif yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan SKP ini. Menurut Suroto, YSKK mempersilahkan dan berterimakasih jika pihak Pemkab Gunungkidul ingin bersinergi dalam program SKP ini. Demikian juga tanggapan dari berbagai SKPD yang terlibat langsung dalam dialog tersebut. Pada prinsipnya sangat mendukung program SKP yang merupakan inisiasi dari YSKK ini. Adapun tindak lanjut dari dialog tersebut adalah mengkomunikasikan semua hasil dialog kepada Bupati Gunungkidul yang akan difasilitasi oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah, mendiskusikan berbagai bentuk sinergi antara YSKK dan

Pemkab Gunungkidul, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan SKP (yskk a. , 2019).

b. Pengenalan Program Pemberdayaan Perempuan

Sebelum memulai pelaksanaan program pemberdayaan, Yayasan Satu Karsa Karya terlebih dahulu melakukan sosialisasi awal untuk mengenalkan program-program yang akan dilaksanakan ke depannya. Dalam sosialisasi awal ini Yayasan Satu Karsa Karya hanya menyampaikan kepada pemerintah desa beberapa tokoh desa yang nantinya akan memperluas penyebaran informasi. Dalam awal pelaksanaan dan pendampingan ini membutuhkan pendekatan agar dapat diterima di masyarakat setempat. Dalam hal ini LSM Yayasan Satu Karya Karya sebagai aktor utama pemberdayaan melakukan pendekatan secara individu melalui perempuan yang punya pengaruh di Desa Watusigar yang nantinya akan menjadi jalan untuk melaksanakan program pada masyarakat luas. Seperti yang disampaikan oleh Bu Lusi dari YSKK ketika melakukan wawancara tanggal 3 Desember 2021 yang berkata:

“ Pendekatan dilakukan secara individu, terhadap tokoh dan orang yang berpengaruh di desa seperti perangkat desa dan untuk perempuan yaitu istri kades, istri kepala dukuh, dan ketua PKK. Kepada mereka juga kami sampaikan terkait program-program yang akan dilaksanakan kedepannya. Melalui tokoh-tokoh inilah program pemberdayaan dapat berjalan baik dan tersampaikan dan dirasakan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendampingan pemberdayaan perempuan dengan melakukan pendekatan secara individu melalui para isteri pejabat dan orang yang berpengaruh di desa setempat dan berbagai organisasi atau instansi seperti PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya.

Selanjutnya karna wilayah desa sangat luas dan dengan berbagai latar belakang pekerjaan masyarakatnya maka Yayasan

Satu Karsa Karsa membentuk tim yang mana anggotanya ialah beberapa perempuan desa setempat yang diberi nama TIFA (Tim Informasi dan Advokasi), TAPA (Tim Advokasi Perempuan dan Anak) dan PPTPA (Pos Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak). Seperti yang disampaikan oleh bu Lusi dari YSKK dalam wawancara tanggal 3 Desember 2021 mengatakan:

“Fokus yang kita dampingi luas dan karena ga bisa semua perempuan desa, maka kita pilih beberapa perwakilan perempuan yang kemudian kita kasih nama mereka TIFA (tim informasi dan advokasi), TAPA (Tim Advokasi Perempuan dan Anak) dan PPTPA (Pos Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) bertugas untuk melakukan sosialisasi, pendidikan dan pendampingan tentang permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan anak”

Untuk mempermudah berjalannya program menghasilkan apa yang diinginkan dalam pemberdayaan tersebut YSKK berupaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan yang dimulai dari penguatan terhadap anggota TIFA, TAPA, PPTPA sendiri, hal ini diungkapkan oleh ibu lusi dari YSKK dalam wawancara pada tanggal 3 Desember 2021 dengan mengatakan :

“Sebelumnya kader-kader ini telah melakukan berbagai bimbingan dan kegiatan yang diadakan LSM YSKK guna melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas. Kader kami ini masuk kemasyarakat melalui kegiatan seperti: PKK, KWT, Karawitan, Rapat Karang Taruna, KOPWAN dan lain sebagainya. Jadi, memang didalam program peningkatan kapasitas perempuan ini kita ada 2 jalur yang dikuatkan. Pertama Kader Perempuan Potensial desa, biasanya ini ibu2 atau remaja perempuan yang aktif di desa. Aktif di PKK, Posyandu, Karang taruna dan kegiatan2 desa. Kedua Kader Perempuan yang sudah punya Jabatan atau nama di Desa, seperti Perempuan/istri Kepala Desa, Perempuan/istri Perangkat Desa, Perempuan BPD/LPM Desa. Anggota tifa pada umumnya yaitu tokoh perempuan desa seperti istri-istri

pejabat desa setempat, pengurus aktif pkk, tokoh yang dirasa memiliki pengaruh terhadap masyarakat umum.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua program untuk mempermudah penguatan kapasitas perempuan yakni kader perempuan potensial desa dan kader perempuan yang sudah punya jabatan atau nama di desa. Sehingga dengan demikian akan memudahkan pemetaan (*mapping*) kekuatan atau pemberdayaan yang bisa dilaksanakan oleh kaum perempuan.

Dari pemaparan diatas pula yang termasuk dalam anggota tim nantinya akan di berikan bimbingan, pendidikan politik dan diberi materi terlebih dahulu yang nantinya akan didampingi untuk membantu proses pemberdayaan dimasyarakat luas. Setelah melalui proses panjang fungsi dan peran utama TIFA/TAPA/PPTPA sendiri yakni sebagai pusat informasi (menyediakan data dan informasi terkait dengan persoalan tentang kebijakan, program, kondisi perempuan dan anak, serta menyebarluaskan dan mensosialisasikan informasi terkait dengan persoalan berupa kebijakan dan program yang berkorelasi . Hal itu juga sebagai pusat konsultasi (melakukan penyadaran terkait dengan kondisi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta upaya pencegahan, memberikan pelayanan baik secara aktif maupun pasif berhubungan dengan persoalan yang terjadi), penguatan peran publik strategis dalam pembangunan (kontribusi aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan pembangunan dan kepanitiaan maupun kepengurusan kegiatan pembangunan, melakukan advokasi berbagai kebijakan pemerintah desa atau keb untuk menjamin partisipasi perempuan dalam pembangunan, mendorong , dan mengawal program serta anggaran pembangunan desa).

2. Peran Sebagai Fasilitator

Perempuan dinilai perlu mengoptimalkan potensi untuk menangkap peluang yang ada. Hal ini dapat meminimalisir ketimpangan yang hingga saat ini masih terjadi. Perempuan harus berdaya agar dapat berkiprah di ranah politik. Tidak sekadar pemenuh kuota politik 30%, tapi secara kualitas yakni kecakapan dan ketangkasan mereka dipertimbangkan selayaknya lelaki. Dalam ranah politik, perempuan memiliki modal sosial untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa ataupun kepala daerah. Akan tetapi, belum ada kelompok atau organisasi perempuan di daerah yang bersedia mengusung satu tokoh untuk maju saat Pilkadaes maupun Pilkada. Jejaring dengan kelompok atau organisasi di daerah perlu diperkuat. Kelompok seperti PKK, KWT (Kelompok Wanita Tani) dan lain sebagainya harus bisa digunakan untuk membahas isu-isu strategis. upaya meminimalisir ketimpangan ini dapat tercapai jika pemerintah daerah mengambil langkah konkrit. Harus ada kebijakan dan program yang secara nyata memberi ruang partisipasi bagi perempuan. Selain itu, media massa yang diyakini sebagai sumber informasi masyarakat belum menyoroti kiprah pemimpin perempuan dari desa. YSKK disini mendesain sebuah pelatihan khusus untuk calon fasilitator program pemberdayaan masyarakat maupun siapapun yang ingin berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka memiliki kapasitas dan mampu menjalankan peran pemberdayaan, pengorganisasian komunitas, pengembangan sumberdaya manusia, serta memecahkan sebuah masalah. (yskk A. , 2019). Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki perempuan maka YSKK melakukan pemberdayaan politik terhadap perempuan.

a. Program Pemberdayaan Politik Perempuan

Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, peluang, keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam

menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan ditujukan khususnya kepada kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto E. , 2014)

Perempuan desa notabene masih dianggap marginal atau terpinggirkan. Maka untuk memberdayakan perempuan harus sering atau diadakan suatu program aktifitas atau kegiatan yang menunjang pemberdaya bagi perempuan. Program Lembaga Swadaya Masyarakat YSKK dalam pemberdayaan politik perempuan telah membantu meningkatkan kualitas perempuan dan memberdayakan masyarakat dengan adanya faktor lain. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu terberdayanya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Kebethasilan dalam kerja organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya, oleh karenanya dibutuhkan kesadaran terus menerus untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui beberapa cara.

Di sisi lain, YSKK demi untuk memperkuat kapasitas diri perempuan mengadakan berbagai progam yang menunjang pemberdayaan perempuan. Yang mana beberapa perempuan pilihan selanjutnya diberi pemahaman dan materi hingga pada akhirnya menjadi anggota TIFA dan menjadi tangan kanan YSKK untuk

masuk ke masyarakat luas. Sesuai dengan yang dilakukan oleh LSM Yayasan Satu Karsa Karya yang berupaya meningkatkan taraf hidup perempuan dengan membangkitkan kesadaran, memotifasi dan penguatan kapasitas politik. Program-program yang dijalankan oleh LSM Yayasan Satu Karsa Karya adalah :

1) Sekolah kepemimpinan perempuan (SKP)

Sekolah Kepemimpinan Perempuan, SKP lahir ditengah-tengah perjuangan perempuan di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y. dalam meningkatkan harkat martabatnya dalam arus deras pembangunan yang seringkali lupa menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Yayasan Satu Karsa Karya, YSKK Surakarta melihat ini sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi perempuan sehingga bersama berbagai komunitas perempuan desa di Gunungkidul mulai sering membicarakan tentang wadah apa yang bisa diupayakan bersama sebagai “rumah” bersama bagi perempuan untuk belajar dan berbagi pengalaman, pada akhirnya YSKK bersama perwakilan perempuan di beberapa desa di Gunungkidul meluncurkan Sekolah Kepemimpinan Perempuan, yang juga banyak melibatkan unsur pemerintahan kabupaten sebagai sumber daya pendukung. SKP menempatkan para perempuan yang terlibat sebagai kader, perempuan pemimpin, perempuan politisi, aktivis, pendamping masyarakat, fasilitator masyarakat, dan para perempuan yang berjuang sebagai ibu rumah tangga sekaligus memandirikan dirinya secara ekonomi dengan berbagai kegiatan. Tahun 2016, SKP berlanjut dengan menyandarkan aktivitasnya pada peluang dan tantangan dalam implementasi UU Desa yang dengan tegas memberikan definisi bahwa perempuan sebagai stakeholder desa. Dan tahun 2016 SKP mengkrystal menjadi sebuah “rumah bersama” bagi para

kader perempuan pemimpin yang diharapkan dapat menjembatani antara *governance* dengan kualitas keluasan dan kedalaman partisipasi masyarakat, pendidikan politik warga, dan pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat dalam sebuah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan di desa, bersatu dalam berjuang guna mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Sekolah Kepemimpinan perempuan adalah salah satu pendidikan politik. Melalui SKP juga para perempuan ini diajak untuk melihat segala potensi yang dimiliki, melihat segala kekuatan yang dimiliki, dan peluang yang dimiliki demi untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintah desa (yskk, 2019). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan pelatihan. Adapun materi yang disampaikan yaitu :

- a) Pemahaman terkait Hak Asasi manusia;
program ini bertujuan untuk menyadarkan sekaligus menambah wawasan tentang hak-hak asasi manusia
- b) Gender dalam pembangunan;
- c) Perencanaan Desa - Daerah Yang Partisipatif;
- d) Tahap - tahap perencanaan Desa – daerah;
- e) Proses Penganggaran Desa yang isinya terkait dengan proses2 pembangunan desa – daerah;
- f) Peran perempuan dalam politik pembangunan;
- g) Strategi komunikasi dan pelatihan publik speaking.
- h) Mengelola Konflik.

Sekitar 200 Menit para peserta diajak untuk mengetahui lebih dalam apa itu konflik/definisi konflik, kemudian jenis jenis konflik, penyebab konflik, strategi penyelesaian konflik dan Manfaat konflik.

Setelah serangkaian materi tersampaikan di akhir mengadakan Kelas Konsultatif yang didampingi oleh pak yang bersifat diskusi. Dari hasil diskusi kelompok tersebut kemudian lahir beberapa strategi – strategi dalam upaya meningkatkan dan memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan desa yaitu pembentukan SDM yang berkualitas seperti belajar IT, Penguatan mental, dan ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan kegiatan desa, memberikan penyadaran kepada para perempuan desa tentang arti penting perempuan terlibat dalam pembangunan desa melalui pertemuan PKK, pertemuan RT/RW, mengawasi kinerja pemerintahan desa, dan mengusulkan program – program desa yang responsif gender.

Materi-materi tersebut diselenggarakan selama 6 hari di ruang pertemuan BPMPKB dan balai desa Sambirejo dan disampaikan oleh beberapa Narasumber yang ahli dibidangnya yaitu Sekda, Pemerintahan Desa, Bappeda, dan LSM.

2) Seminar dan talkshow

Program ini dilakukan dengan tujuan mulai dari penyadaran, memotifasi hingga pendidikan politik, tema yang diusung seperti

a) Kepemimpinan Perempuan : Membangun Demokrasi Sehat Dari Desa;

Acara Diskusi Panel ini merupakan serangkaian acara sekaligus Peluncuran Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang diinisiasi oleh YSKK. Acara ini untuk meningkatkan motivasi para peserta SKP untuk terus berkomitmen dalam mengikuti setiap pertemuan SKP sampai selesai dengan bersungguh-sungguh. Dalam diskusi yang diadakan pada peluncuran program SKP ini menekankan bagaimana perempuan dapat menduduki posisi-posisi strategis dalam unsur-unsur Musrenbang dan PNPM, seperti Tim Penulis

Usulan (TPU); Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); Tim Delegasi di Musyawarah Antar Desa (MAD); dan Musrenbangcam, karena hal ini sangat strategis bagi pengawalan usulan-usulan program yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, dan perempuan harus berani ikut dalam kontestasi politik, baik itu pilkades, pemilihan anggota BPD, Kelembagaan Desa, Pileg, dan posisi-posisi strategis lainnya (yskk, 2019). Dalam acara ini yang menjadi narasumber yaitu Sri Sumiyati, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMP&KB Kabupaten Gunungkidul dan Suroto Direktur YSKK.

- b) Pentingkah keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintah desa?;

Diskusi Publik terkait temuan hasil riset tim YSKK pada pilkades dan pembentukan BPD. Diskusi Publik diikuti oleh 60 Peserta yang merupakan undangan dari YSKK dengan mengadirkan Ketua DPRD dan Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa sebagai narasumber. Ditambah lagi dihadiri oleh Bupati Gunungkidul sebagai Keynote Speech.

- c) Bagaimana seharusnya peran desa dalam pemenuhan hak asasi manusia dan implementasi uu desa;

Narasumber dalam seminar ini yaitu Lusiningtias (yskk), Muhammad Fachan (Bagian Administrasi Pemerintah Desa Kabupaten Gunungkidul) dan Tri Sularno (Kepala Desa Semin

- d) Bagaimana peran negara dalam memenuhi hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya perempuan;

Seminar ini dilaksanakan di ruang pertemuan BPMP&KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) sekaligus koordinasi TIFA-TAPA. Koordinasi

diikuti oleh 16 anggota TIFA TAPA. Materi dari YSKK yang difasilitasi oleh A.Riyadh.M.L (Tim Program Women Leadership) ini untuk menambah pengetahuan para anggota TAPA TIFA.

- e) Kampanye pendidikan politik (Upaya perempuan dalam penyadaran politik dan mengikis budaya politik uang).

Diakhir pertemuan, YSKK bersama dengan para fasilitator perempuan desa mengajak peserta untuk bisa menyebarluaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan desa kepada para perempuan yang ada di dusun masing – masing. Melalui pertemuan – pertemuan yang ada di tingkat dusun dapat disisipi materi penyadaran politik untuk perempuan. Karena dengan melakukan kampanye penyadaran tersebut harapannya akan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak – hak nya, sadar akan masa depan desanya. Ketika semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya keterlibatannya dalam pembangunan desa, maka pemenuhan akan hak perempuan pun akan semakin banyak yang memperhatikan. Bertempat di Balai Desa Watusigar Kecamatan Ngawen, kampanye ini diselenggarakan. Dengan dihadiri 21 perempuan perwakilan dari PKK setiap Dusun, Kampanye ini difasilitasi oleh bu Lusi YSKK dan mengulas seputar politik uang yang marak terjadi saat akan ada proses pemilihan. Kampanye ini mengulas terkait bahaya politik uang dan dampak yang akan ditimbulkan di masyarakat.

Seperti yang diutarakan dari bu Lusi pihak YSKK ketika melakukan wawancara dengan bu Lusi pada tanggal 3 Desember 2021 yang mengatakan:

“Mengadakan Sekolah kepemimpinan Perempuan (SKP), mungkin sebagian orang mengatakan ini adalah salah satu

pendidikan politik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan program Penguatan Kapasitas, dan pelatihan, materi yang disampaikan yaitu tentang penyadaran dan pemahaman terkait Hak Asasi manusia; Gender dalam pembangunan; Perencanaan Desa - Daerah Yang Partisipatif; Tahap - tahap perencanaan Desa – daerah; proses Penganggaran Desa yang isinya terkait dengan proses2 pembangunan desa – daerah; peran perempuan dalam politik pembangunan; strategi komunikasi dan pelatihan publik speaking, dan konflik, dan di akhir materi ada kelas konsultatif. Selain itu juga melakukan Workshop dengan tujuan mulai dari penyadaran, memotifasi hingga penguatan kapasitas seperti tentang Kepemimpinan Perempuan: Membangun Demokrasi Sehat Dari Desa; Pentingkah keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintah desa?; bagaimana seharusnya peran desa dalam pemenuhan hak asasi manusia dan implementasi uu desa; bagaimana peran negara dalam memenuhi hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya perempuan; kampanye pendidikan politik (Upaya perempuan mengikis budaya politik uang).”

Lebih lanjut yang disampaikan oleh YSKK bahwa politik uang sendiri sangat penting untuk disampaikan karena masyarakat menganggap fenomena itu sebagai hal biasa yang sudah membudaya dan dianggap suatu hal yang tidak dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi. Hal ini diperkuat oleh bu Yarsi salah satu kader PKK ketika melakukan wawancara tanggal 10 Desember 2021 dengan mengatakan:

“ Bagaimana masyarakat mau menolak, karena semua juga menerima pemberian itu dan lumayan sudah ada yang kasih, kan sekalian buat tambah-tambah pemasukan dirumah”.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pentingnya diadakan workshop bagi perempuan tentu saja untuk memberi pendidikan dan pengetahuan politik serta menolak segala bentuk *kemadharatan* seperti halnya yang sudah menjadi hal lumrah yakni politik uang. Dengan politik uang, seseorang dapat meraih

kekuasaan. Sehingga dengan pancingan uang untuk memuluskan langkahnya di panggung politik merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Pentingnya melakukan pendidikan politik terutama kepada kaum perempuan agar semakin memahami dan *concern* terhadap persoalan politik.

Strategi yang digunakan oleh LSM YSKK dalam proses pemberdayaan ini sejalan dengan dua aras strategi dalam pemberdayaan yang dikemukakan oleh Soeharto, yaitu

- b. Aras Mikro. Yang mana pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, kritis intervention. Tujuan utamanya yaitu membimbing dan melatih klien dalam melakukan tugas sehari-hari. Strategi ini digunakan pada tahap awal pemberdayaan yang mana demi memudahkan LSM untuk menjalankan program maka pendekatan dilakukan individu melalui isteri-isteri pejabat desa.
- c. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang. Penggunaan kelompok sebagai media intervensi digunakan untuk memberdayakan masyarakat. YSKK dalam hal ini melalui anggota TIFA mengadakan pendampingan dengan berbagai organisasi perempuan yang ada di desa seperti PKK, KOPWAN, KWT dan Karawitan, sebagai salah satu pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu proses penyadaran dan materi juga disampaikan pada setiap pertemuan organisasi keperempuanan, yang sehingga perempuan desa mulai memiliki kesadaran akan hak-haknya dalam politik dan terlibat dalam rapat-rapat desa seperti halnya musrenbangdes.

C. Implementasi Pemberdayaan Politik Perempuan Dengan Pihak Lain

Dalam pemberdayaan terhadap perempuan tentu saja tidak bisa dilakukan dengan sepihak dan hanya segelintir orang baik secara personal maupun kelompok. Hal ini juga membutuhkan dukungan segala lapisan kehidupan. Relasi atau koneksi itu sangat penting ketika ingin melakukan pengembangan atau pemberdayaan yang lebih luas dan berhubungan dengan segala pihak agar memudahkan untuk mensukseskan agenda atau kegiatan yang diharapkan. Terutama dukungan tidak sebatas dari organisasi luar saja akan tetapi yang lebih penting bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Sebelum terjun ke masyarakat secara langsung, LSM terlebih dahulu menyampaikan program dan berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait proses awal dalam perencanaan program. Karena dalam pemberdayaan yang terkadang identik dengan pembangunan akan melalui tahap-tahap perencanaan, implementasi, monitoring, serta sasaran yang menjadi objek pemberdayaan dengan melakukan analisa terutama metode yang akan digunakan dalam proses pemberdayaan. Seperti yang di sampaikan oleh perwakilan YSKK dalam wawancara dengan bu lusi selaku koordinator program tanggal 3 Desember 2021 yang mengatakan:

“Setiap Kegiatan yang YSKK lakukan pasti bekerjasama dengan pemerintah Desa - kabupaten. Dengan pemerintah Desa seperti pengorganisasian peserta ketika ada kegiatan dibantu pemdes, kebutuhan dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran desa biasa kita dapat juga dari desa. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tingkat desa biasanya kami mengundang pemerintah desa. Untuk pemerintah Kabupaten pun sama tergantung Dinas mana yang bekerjasama dengan kita seperti contoh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebelum kelapangan kami juga berdiskusi dengan penda setempat terkait program yang akan kami terapkan nantinya. Untuk program Peningkatan Partisipasi Politik perempuan YSKK bekerjasama dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan, pemkab dan pemdes setempat. Setiap pelaksanaan Sekolah kepemimpinan Perempuan (SKP) selalu dibuka oleh Bupati atau Pemerintah daerah, dan sertifikat SKP juga ditanda tangani oleh Bupati Gunungkidul.”

Selain itu, terdapat unsur atau komponen lain agar aktifitas pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan seperti yang dikemukakan kembali oleh bu Lusi YSKK dalam wawancara tanggal 3 Desember 2021 yang mengatakan:

“Terkait program peningkatan Partisipasi perempuan, unsur-unsur yang terlibat dalam program : YSKK (inisiator program), Kader Perempuan Desa, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten - DPRD Kabupaten, Masyarakat secara umum. selain itu ada juga unsur pasif seperti dokumen perencanaan desa - daerah, peraturan daerah dan bupati, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya. sama ada kolaborasi dengan LSM atau NGO Lokal – Nasional”

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kerja sama dengan instansi terkait terutama dengan para *stakeholder* yang berkecimpung di pemerintahan memudahkan dalam proses untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Sehingga setiap event atau acara kegiatan yang diadakan demi menunjang kemampuan pemberdayaan perempuan bisa dilaksanakan secara periodik.

D. Pencapaian (*Output*) Pemberdayaan Perempuan

Implementasi pemberdayaan pada perempuan tentu saja harus sepatutnya memberikan *output* atau hasil yang baik dan maksimal. Sehingga kedepan tercipta kader atau regenerasi perempuan terutama dalam ramah politik dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Jika implementasi yang sudah dilaksanakan tidak mampu memberi output regenerasi yang baik dan berkelanjutan maka tongkat estafet perempuan berkecimpung dalam panggung politik maupun pemerintahan akan habis dan tidak mampu berkontribusi atas aspirasi dari perempuan sendiri untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemberdayaan perempuan khususnya pada ranah politik pada akhirnya harus memiliki output atau hasil yang diharapkan dan sukses dalam menciptakan regenerasi kader

yang siap terjun di gelanggang politik praktis. Tentu ini juga menjadi parameter atau tolak ukur keberhasilan pemberdayaan yang di implementasikan dengan beberapa program utama dan program pendukung lainnya. Pencapaian harus bisa memenuhi prinsip keberhasilan dan kiprah perempuan bisa berpolitik. Hasil yang diperoleh dari pemberdayaan ini yaitu :

- a. Jumlah kader perempuan yg dilibatkan dalam kegiatan desa meningkat
- b. Meningkatnya jumlah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa dengan hampir 60% perempuan masuk menjadi perangkat desa yaitu 9 orang perempuan masuk sebagai perangkat desa,
- c. Peningkatan anggaran desa terkait pemberdayaan perempuan dan anak
- d. Ekonomi perempuan meningkat signifikan
- e. Menurunnya tingkat KDRT dan anggapan bahwa perempuan hanya persoalan dapur,
- f. Kader TIFA sudah mampu bekerja sama dengan dinas terkait untuk layanan konsultasi (contoh dalam penanganan kasus KDRT terdapat dinas yang mempunyai layanan psikologi) dan penanganan pasca kasus diserahkan ke pengadilan dengan adanya pembekalan keterampilan dan hibah alat,
- g. Peningkatan keberanian berbicara perempuan dalam forum meningkat, hal yang dirasakan oleh kader TAPA maupun perempuan lainnya di desa dengan adanya kegiatan TAPA adalah keberanian minimal dengan berpendapat dan isi sambutan tuan rumah setiap kali pertemuan diadakan.”

Sebagaimana yang disampaikan oleh bu Lusi YSKK ketika melakukan wawancara 3 Desember 2021 yang mengatakan:

“Pencapaian yang telah kami raih dalam melakukan pemberdayaan di desa ini antara lain: jumlah kader perempuan yg dilibatkan dalam kegiatan desa meningkat, peningkatan jumlah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dengan hampir 60% perempuan masuk menjadi perangkat desa yaitu 9 orang perempuan masuk sebagai perangkat desa, selain itu terdapat peningkatan anggaran desa

terkait pemberdayaan perempuan dan anak, ekonomi perempuan meningkat signifikan, hal ini terjadi dengan bertambahnya perempuan yang mempunyai usaha dagang secara individu maupun kelompok yang dilakukan dengan terlibat kegiatan dagang dari kelompok Desa Prima, KWT, maupun dari Koperasi, menurunnya tingkat KDRT dan anggapan bahwa perempuan hanya persoalan dapur, kader TIFA sudah mampu bekerja sama dengan dinas terkait untuk layanan konsultasi (contoh dalam penanganan kasus KDRT terdapat dinas yang mempunyai layanan psikologi) dan penanganan pasca kasus diserahkan ke pengadilan dengan adanya pembekalan keterampilan dan hibah alat, peningkatan keberanian berbicara perempuan dalam forum meningkat, hal yang dirasakan oleh kader TAPA maupun perempuan lainnya di desa dengan adanya kegiatan TAPA adalah keberanian minimal dengan berpendapat dan isi sambutan tuan rumah setiap kali pertemuan diadakan.”

Hadirnya LSM Yayasan Satu Karsa Karya juga dirasakan oleh masyarakat telah memberi pengaruh terhadap posisi perempuan di Desa Watusigar, karena melalui program-programnya telah memberi kontribusi nyata pada perempuan-perempuan Desa Watusigar dengan melakukan pendampingan, pelatihan serta penguatan kapasitas. Dalam pelaksanaannya juga diimbangi dengan potensi sumber daya manusia sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan dikatakan berhasil jika ada timbal balik antar masyarakat dengan LSM serta potensi yang mendukung. Jika pelaku pemberdayaan aktif namun masyarakat pasif tentu tidak akan ada timbal balik yang positif dalam pengembangan begitupula sebaliknya. Adapun hasil wawancara pada 10 Desember 2021 dengan salah satu masyarakat yang juga anggota pkk dan kader tifa yang juga pengurus kopwa bu Yarsi yang mengatakan:

“Kalau menurut saya peran dari LSM YSKK mendukung disegalanya. Saya sebagai salah satu masyarakat merasa kegiatan yang dimotori oleh LSM YSKK merasa terbantu, karena saya dan beberapa masyarakat terkusus perempuan bisa dikatakan kurang memahami tentang politik dan pemerintahan. Dan saya rasa perempuan disini juga tidak mengetahui hak sebagai warga negara bahkan mereka tidak peduli akan hal-hal semacam itu. Dan alhamdulillah saat ini banyak perempuan yang

terlibat dalam pemerintahan desa, mulai aktif dan terarahnya pkk dan beberapa organisasi perempuan. mereka juga mulai dilibatkan dan hadir dalam rapat-rapat di desa. Masyarakat disini juga menyambut baik hadirnya LSM” .

Hal senada juga disampaikan oleh bu Tarmi salah satu kader PKK mengatakan :

“Sangat membantu ya mas, Dulu biasanya pramusren di dukuh atau biasa disebut musdus itu ya musyawarah biasa saja. Seperti hanya usulan-usulan dan hanya beberapa orang terlibat sehingga musyawarah bersama masyarakat seperti yang seharusnya. Namun kini saya paham alur pra musren yang seharusnya”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hadirnya LSM YSKK sangat diterima baik oleh masyarakat. Perempuan merasa terbantu dalam meningkatkan taraf hidup. Adanya program pemberdayaan oleh YSKK ini juga dinilai ada peningkatan yang cukup signifikan dan yang paling di rasakan ada pada aspek sosial di mana masyarakat atau kaum perempuan yang dulunya di pandang sebelah mata dalam kontestasi politik namun pada saat ini sudah sangat di perhitungkan akibat dengan banyaknya posisi-posisi politik yang di isi oleh kaum perempuan yang tentunya mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan menggiring kebijakan tersebut mengarah ke keberpihakan terhadap kaum perempuan dan tentunya lebih memotifai untuk kaum perempuan lainnya untuk berdaya dalam banyak aspek.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa dapat dilihat dalam struktur perangkat desa watusigar, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kepala Desa | : Gimam |
| 2. Sekdes | : Karsimin |
| 3. Kaur tata usaha/umum | : Susana Dewi |
| 4. Kaur perencanaan | : Fitri Purwanti |
| 5. Kaur keuangan | : Wahono |
| Staff | : Anggun Rini Astuti |
| 6. Kaur pemerintahan | : Wiji Rustanto |

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 7. Kaur pelayanan | : Damiya |
| Staff | : Novytasari Wibowo |
| 8. Kaur kesejahteraan | : Wahyudi |
| 9. Dukuh Tapansari | : Rohmat Santoso |
| 10. Dukuh Sambirejo | : Etik Winarsih |
| 11. Dukuh Randusari | : Lujino |
| 12. Dukuh Cikal | : Wasido |
| 13. Dukuh Dungmas | : Suparjono |
| 14. Dukuh Munggur | : Erwin Desty Purwatiningsih |
| 15. Dukuh Mbuyutan | : Anik Widyaningsih |
| 16. Dukuh Ngimbang | : Suyatno |
| 17. Dukuh Ngampon | : Bakat |
| 18. Dukuh Sabrang | : Supadi |
| 19. Dukuh Kepek | : Sutopo |
| 20. Dukuh Watusigar | : Daniar Sutagil |

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian hasil atau *output* pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LSM YSKK yakni jumlah kader perempuan mengalami peningkatan, peningkatan anggaran, ekonomi perempuan meningkat, kader TIFA dapat bekerjasama dengan dinas terkait, keberanian perempuan dalam forum meningkat.

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI DESA WATUSIGAR, GUNUNGGKIDUL

A. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Politik Perempuan

Dalam penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa faktor yang memiliki kontribusi signifikan sekaligus kendala yang dikatakan sebagai penghambat kaum perempuan untuk terlibat dalam bidang politik. Yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat berdampak signifikan terhadap mekanisme rekrutmen politik, terutama dalam hal keterbukaan masyarakat terhadap peran perempuan dalam kegiatan sosial politiknya. Stereotip laki-laki dan perempuan cukup nyata bagi masyarakat di wilayah Watusigar yang masih menganut paham patriarki, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin atau bahkan ide-ide perempuan lambat laun menenggelamkan peran perempuan, oleh karena itu posisi perempuan dalam budaya ini jelas terlihat jika tanggung jawab utama mereka hanya untuk memenuhi semua kebutuhan laki-laki dan keluarganya. Kondisi ini jelas berdampak pada partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan, sehingga sulit untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik dan memenuhi hak-haknya dalam politik. Berdasarkan hasil riset tim YSKK menunjukkan faktor sosial budaya juga yang menyebabkan terjadinya praktek politik uang. Sebagaimana yang disampaikan oleh bu Lusi YSKK ketika melakukan wawancara yang mengatakan:

“Kesulitan yang dialami oleh Tim YSKK ketika memulai yaitu mencari perempuan yang memiliki semangat untuk membangun desa. Dalam perekrutan peserta SKP terutama itu kan pelaksanaannya tidak sebentar dan tidak di desa mereka yang tentunya harus meninggalkan rumah, dan sedangkan

perempuan disana secara pemikiran yang terbentuk dari lingkungan ya udah perempuan di rumah saja ngurus rumah dll. Sebenarnya sebagian dari perempuan tersebut ada yang menyampaikan ke saya jika ia merasakan ketidakadilan dalam pembangunan desa, namun rasa pekeuh dan merasa perempuan selalu dinomorduakan, rasa minder karena merasa pengetahuan yang kurang membuat para perempuan tersebut hanya diam dan pasrah”

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan

Pada umumnya keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial, organisasi massa, dan organisasi partai politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang mencerminkan tingkat wawasan, kesadaran, dan kemampuan intelektualnya, serta diyakini akan mampu berpartisipasi dalam dunia politik yang dinamis pada tingkat yang lebih tinggi daripada kelompok lain. Tingkat pendidikan masyarakat watusigar yang tergolong rendah dan sangat berdampak pada kesadaran atau kepedulian terhadap hak-hak politiknya. Karena aktivitas politik memerlukan pengetahuan dan kemampuannya sendiri dalam memproses setiap tantangan saat ini dan bercita-cita untuk mencapai tingkat efektivitas individu, lingkungan, dan organisasi, pendidikan memainkan peran penting. Kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh bu Lusi YSKK ketika melakukan wawancara yang mengatakan:

“sebenarnya sudah banyak perempuan desa yang memiliki pendidikan tinggi sertingkat SMA bahkan Sarjana, tetapi kebanyakan dari mereka yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk bekerja di luar desanya. Sehingga memang di desa hanya tinggal perempuan – perempuan yang pendidikan rendah dan sulit untuk diajak aktif di desa. Seandainya ada perempuan yang aktif di desa ya hanya tertentu”

Hal senada disampaikan oleh bapak Kronto selaku BPD desa Watusigar yang mengatakan :

“ Di desa itu perempuan yang aktif hanya sedikit dan itu – itu saja, ketika ingin aktif kan seharusnya kelihatan dulu diforum umum, kemudian masyarakat akan terbiasa melihat dia aktif di desa. Dari kami sebenarnya juga mengharapkan mereka aktif dalam forum. Mungkin karena kurang pengalaman dan pengetahuan sehingga perempuan merasa minder ketika diminta aktif di desa”

3. Ekonomi

Dari segi ekonomi, mayoritas perempuan di daerah ini adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah. Bahkan jika mereka bekerja, itu hanya untuk menambah atau mendukung penghasilan suami mereka, menyiratkan bahwa penghasilan perempuan terbatas untuk membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akibatnya, jika dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih berdaya secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berdampak signifikan terhadap kemampuan mengambil keputusan dalam keluarga. Hal ini kemudian terbawa ke dalam situasi sosial. Diantaranya adalah sikap memilih mereka dalam pemilihan kepala daerah hingga presiden, di mana mereka cenderung memilih sesuai dengan preferensi suaminya. Ekonomi yang kurang tentu akan menghambat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit.

Seperti yang di sampaikan oleh bu Yarsi salah satu anggota tifa dalam wawancaranya mengatakan:

“Kalau kendala mungkin lebih pada awal-awal saja ya, perempuan disini kurang tertarik sama urusan politik, jadi dalam memberi pemahaman sedikit butuh waktu lah, ya mungkin karna emang mereka berfikir rumit dan lingkungan tidak mendukung juga ya hampir tidak ada pembahasan terkait itu si. Terus dalam berjalannya waktu disini mayoritas sibuk urusan rumah tangga mulai ngurus rumah/anak, ada juga yang bertani dari pagi- sore, terutama saat musim-musim menggarap ladang atau persiapan tanam dan panen seringkali mereka

memilih absen untuk hadir dalam pertemuan, jadi ya mungkin disetiap pertemuan tidak bisa selalu hadir semua. “

Hal yang sama juga disampaikan oleh bu Lusi dari LSM YSKK dalam wawancara pada tanggal 3 Desember 2021 yang mengatakan :

“ya karena untuk mencalonkan diri dalam pilkada tentu membutuhkan dana dan itupun bisa dikatakan tidak sedikit tentunya faktor ini juga sangat mempengaruhi perempuan-perempuan untuk maju. Apalagi tiak ada jaminan mereka pasti menang kan. Anggota organisasi perempuan sendiri banyak yang tidak bisa mengoperasikan komputer jadi kami ya harus dari awal mengajari cara pengoperasian cara menggunakan modem karna di sana jaringan susah juga. Warga sana emang rata-rata pendidikan smp sma ya jadi ya gak kepikiran belajar komputer buat apa gitu, dalam bekerja juga tidak pernah menggunakan media dan alat elektronik. Terus ekonomi warga sana juga tergolong menengah kebawah, yang bapak-bapak ya sibuk bekerja ada yang petani, buruh harian, supir jadi yang ibu-ibu ya harus mengurus semuanya pekerjaan yang ada di rumah, yang peternak ya harus nyari rumput tiap hari, yang petani ya harus ke ladang atau sawah jadi ya mikirnya gimana kebutuhan sehari-hari terpenuhi”.

4. Peran Serta Pemerintah

Pemerintah menjadi *sparing partner* yang saling mutualis terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan sendiri. Sebab, mau tidak mau ketika perempuan berkancah di ranah politik tentu saja harus bergesekan atau bersinggungan dengan para petinggi dan pelaku politik di pemerintahan sendiri. Maka, ketika didukung dan melakukan kerjasama yang *apik* dengan pemerintah, maka semua program atau kegiatan dapat berjalan lancar dan menjaga relasi dengan pemerintah menjadi semakin baik terutama pemerintah desa. seperti yang di sampaikan oleh bu Lusi dalam wawancaranya mengatakan:

“Pemerintah desa juga sangat mendukung program kami, mereka juga selalu membantu baik dari mengkondisikan peserta maupun fasilitas tempat. Dari dinas-dinas terkait juga membantu, sebelumnya kami menyampaikan rencana program dan mereka menerima dan kita diskusi lebih lanjutnya, beberapa juga ada pameri dari mereka.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan pemerintah desa di tempat perempuan tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan dan mendapat dukungan yang maksimal ketika bekerjasama dengan pemerintah desa sendiri.

5. Institusi Lain

LSM saat ini banyak sekali yang bergerak dalam berbagai bidang. Sudah banyak peran dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh LSM terutama dalam memberdayakan perempuan yang mampu menjangkau yang belum tersentuh dari program pemerintah dengan keswadayaan yang dipunyai, dalam suatu pemberdayaan tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, karena suatu program akan sulit berjalan tanpa adanya dana. Dalam pendanaan kegiatan ini LSM YSKK bekerjasama dengan Kedubes Jepang. Dengan adanya dukungan dana dari Kedubes Jepang, pemberdayaan perempuan di Gunung Kidul Yogyakarta menjadi berkembang dan mengalami progresifitas yang lebih mumpuni. Seperti yang bu Lusi dari YSKK yang mengatakan:

“Pendukung dalam program ini, kalo terkait dana kami dapat dana dari kedubes jepang yang kami gunakan untung kebutuhan peralatan penunjang kegiatan seperti komputer, printer, modem dan yang lainnya, yang mana digunakan PKK untuk bekerja dan mencari informasi. Dari beberapa masyarakat alhamdulillah ada kemauan berubah kearah yang lebih baik dalam bermasyarakat yang tentunya ini memudahkan kami untuk mencapai hasil maksimal.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedubes Jepang memiliki kontribusi positif atas pemberdayaan perempuan membantu perempuan di Gunung Kidul Yogyakarta menjadi semakin maju.

6. Pendamping Pemberdayaan (TIFA/TAPA/PPTPA)

Dalam suatu masyarakat terutama perempuan dibutuhkan pendampingan yang intensif dan berkesinambungan agar perempuan mampu berkiprah sendiri dalam dunia politik. Sebab, ketika tidak ada

pendampingan yang intensif, mustahil perempuan dapat berkembang dan berpikir maju dan memiliki *sense* politik yang mumpuni.

Dari YSKK melalui TIFA/TAPA/PPTPA mendampingi perempuan Desa Watusigar kabupaten Gunung Kidul agar dapat memberikan ruang kepada perempuan di daerah tersebut untuk *melek* politik. Melalui TIFA memiliki peran yang signifikan seperti yang disampaikan oleh bu Lusi dari YSKK mengatakan:

“ Fungsi dan peran utama TIFA/TAPA/PPTA. TIFA (Tim Informasi dan Advokasi), TAPA (Tim Advokasi Perempuan dan Anak) dan PPTPA (Pos Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) bertugas untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan anak, mereka juga sebagai pusat informasi (menyediakan data dan informasi terkait dengan persoalan/kebijakan/program/kondisi perempuan dan anak, menyebarluaskan/mensosialisasikan informasi terkait dengan persoalan, kebijakan dan program yang terkait dengan perempuan), sebagai pusat konsultasi (melakukan penyadaran terkait dengan kondisi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta upaya pencegahan, memberikan pelayanan baik secara aktif maupun pasif terkait dengan persoalan yang terjadi), penguatan peran publik strategis dalam pembangunan (berperan aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan pembangunan dan kepanitiaan/kepengurusan kegiatan pembangunan, melakukan advokasi berbagai kebijakan pemerintah desa/keb untuk menjamin partisipasi perempuan dalam pembangunan, mendorong dan mengawal program dan anggaran pembangunan desa.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa TIFA dari YSKK memiliki peran sebagai pusat informasi segala hal yang dibutuhkan oleh perempuan terutama di PKK untuk mengetahui berbagai persoalan dan beberapa kebijakan yang mendorong perempuan untuk berpikir kritis dan berpartisipasi dalam pembangunan desa atau kabupaten setempat.

Dilihat dari beberapa aspek tersebut di atas dapat terlihat faktor pendukung serta penghambat yang terjadi di lapangan, terdapat faktor internal dan eksternal perempuan, diantaranya adalah :

- a) Faktor internal, yang meliputi; peran ganda yang dimiliki perempuan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan, ketidakberdayaan ekonomi.
- b) Faktor eksternal, yang meliputi; hambatan kultural yang telah mengakar, hambatan sosial.

Selain faktor penghambat, dalam proses pemberdayaan politik perempuan juga tidak lepas dari faktor pendukung pemberdayaan tersebut. Faktor pendukung dalam pemberdayaan yaitu :

- a) Peran Serta Pemerintah
- b) Institusi Lain dan keuangan
- c) Pendamping Pemberdayaan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) memposisikan kontribusi di tengah masyarakat melalui pendekatan kemasyarakatan baik secara humanis, populis maupun strategis yakni sebagai komunikator dan fasilitator bagi perempuan, mengadakan kerjasama dengan berbagai lapisan di daerah Desa Watusigar Gunung Kidul Yogyakarta. Adapun peran LSM Yayasan Satu karsa Karya dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan desa Watusigar di Gunung Kidul Yogyakarta melalui kelompok. YSKK fokus melakukan pemberdayaan politik perempuan dengan melaksanakan program peningkatan kapasitas perempuan melalui dua jalur yakni:

- a. Melalui kader perempuan potensial desa (perempuan yang aktif di PKK, Posyandu, Karang Taruna dan kegiatan desa lainnya)
- b. Kader perempuan yang sudah mempunyai jabatan atau nama di desa seperti perempuan atau isteri kepala Desa, perangkat desa atau pejabat setempat (BPD atau LPM) dan sebagainya.

Sekolah kepemimpinan perempuan atau SKP dan seminar/diskusi oleh YSKK ini memainkan peranan strategis dalam membentuk warga guna memiliki kepribadian politik, kesadaran politik dan mampu berpartisipasi secara aktif dan responsif sebab perempuan merupakan bagian dari aktor politik praktis yang terlibat dalam sirkulasi kekuasaan publik.

2. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan politik perempuan di desa Watusigar Gunung Kidul Yogyakarta adalah:

Faktor penghambat

1. Budaya
2. Tingkat pendidikan
3. Ekonomi

Faktor pendukung

1. Peran serta Pemerintah
2. Keuangan
3. Pendampingan pemberdayaan

B. Saran atau Rekomendasi

Setelah peneliti melakukan kajian mendalam terhadap LSM YSKK dalam pemberdayaan politik perempuan di desa Watusigar Gunung Kidul Yogyakarta, maka menurut peneliti ada beberapa hal yang perlu ada *follow-up* atau tindak lanjut sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. LSM YSKK

Pendampingan dan penguatan kapasitas perempuan pada ranah politik di desa Watusigar hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan periodik sebab, tidak tergantung momentum saja agar dapat menciptakan regenerasi kader potensial perempuan di bidang politik daerah (lokal) maupun tingkat di atasnya.

2. Masyarakat Desa Watusigar

Bagi masyarakat Watusigar hendaknya dan senantiasa mendukung dan memberi ruang atas kiprah perempuan dalam ranah politik, sebab mungkin di desa Watusigar masih menganggap remeh kapasitas dan kapabilitas perempuan untuk bisa berkiprah di politik setempat.

3. Pemerintah

Pemerintah setempat di desa Watusigar memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan agar dapat mengisi pos-pos di ranah politik dengan melihat perspektif sensitifitas gender, dan bukan memarginalkan peran perempuan yang notabene masih dianggap belum mampu dan maksimal berkiprah di politik.

Pemerintah setempat memberikan ruang dan pelatihan berkelanjutan agar kader-kader perempuan yang potensial dapat berkiprah dan menciptakan kader perempuan yang tangguh dan memiliki kapasitas mumpuni dalam bidang politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Jakarta: Piramedia.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Aminah, Siti. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Aritonang, Esrom. 2001. *Pendampingan Komunitas Pedesaan*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa,
- Azra, Azyumardi. 1999. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Clark, John. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

- Edi Suharto, 2005 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (cet. I), Bandung : PT Refika Aditama,
- Gellner, Ernest. 1994. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo
- Hikam, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
- John M. Echols & Hassan Syadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia, Cet XII*, Jakarta: Gramedia
- Jordan, Lisa dan Peter Van T. 2009. *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: LP3ES.
- Judge, Staphen dan Timonty A. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Harison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mansour, Fakhri. 1996. *Masyarakat sipil untuk transformasi social pergolakan ideology LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Narwoko, Dwi dan Yuryanto Bagong, 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Direksi Cipta.
- Overseas Development Institute (ODI). 2009. *Understanding And Operationalising Empowerment*. London: Overseas Development Institute.

- Overseas Development Institute (ODI). *Understanding And Operationalising Empowerment*. Westminster Bridge Road London SE7 1 JD.
- Peter, Salim. 1996. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press
- Sanapian, Faisol. 1999. *Penelitian Kualitataif Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang : IKIP
- Soehartono, Rawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Robbins, Stephen P. dan Timobthy A. Judge. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soecipto, Ani. 2000. *Perempuan dan Politik Indonesia*. JAKARTA: Logos Wacana Ilmu
- Soekanto, Soejono, 1991, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, PT.Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*. Yogyakarta: Tiara Kencana
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Syam, Nur. 2013. *Membincang Gender di Indonesia*

Tim ICCE. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media

DUKUMEN JURNAL

Abror, Muhammad Daimul dan Suharno. 2017. Peran Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai “Election Marketer” . *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 2(1).

Am, Rizal. rekrutmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD pada pemilihan umum (<http://repository.unej.ac.id>)

Ardiansa, Dirga. 2017. Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 1.

Ari Ganjar & Randi Herdiansah. 2016. peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi* Volume 1 Nomor 1 Desember 2016.

Badan pusat statistik 2001 dalam Endis Firdaus. 2008. *Imam Perempuan, Dekontribusi Perspektif Gender Menuju Kontekstualisasi Politis Ajaran Islam di Indonesia*. *Jakarta-Bandung. Pustaka ceria*

Ballington, J. 2011. *Pemberdayaan Perempuan Demi Partai Politik yang Lebih Kuat: Panduan Praktek Terbaik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan*. (<http://studylibid.com/doc/421754/pemberdayaan-perempuan-demi-partai-politik-yang-lebih-kuat>)

- Baroroh, Kiromim. 2009. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* , 3 (1), 20.
- Dona, Dwipa Rema. 2015. *Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam Pemenangan Pemilu 2014 Studi pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*. Tesis Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Sitorus, Candra. 2015. Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) koalisi perempuan indonesia (KPI) Kota Semarang dalam pemberdayaan politik perempuan di Kota Semarang. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*
- I Nyoman Sumayadi.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Fuad, Zamzam Muhammad. 2015. Peran Pemuda Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah . *Jurnal Ketahanan Nasional*
- Julie, Ballington. 2011. *Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat Panduan Praktek Terbaik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan*, (United Nations Development Programme dan National Democratic Institute
- Kiromim Baroroh. 2009. Peran lembaga swadaya masyarakat Terhadap pemberdayaan perempuan melalui pelatihan *life skill* (Studi kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)

- KPU. 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilu 2014*
- Khoirunnisa, Lifda. 2014. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pascapembangunan PLTU Tanjung Jati B. *Journal of Politic and Goverment Studies*, 3(4),
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. POLITIK UANG DAN DINAMIKA ELEKTORAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Politik*. vol10 no.1
- Malay, M. Nursalim dan Ellya Rosana. 2014. “*Pemberdayaan Politik Perempuan di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Bandar Lampung*”, (Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 2
- Noeleen, Heyzeert , James R. and Antonio B. 1995. *Government-NGO Relations in Asia, Prospects and Challenges For People Centered Development*. Kuala Lumpur: Asian Pasific Development Center.
- Pramudianto. 1999. Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia, *Jurnal Madani* vol.2 No. 3
- Soeharto, Achmad. 2011. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. MUWÂZÂH, Vol. 3, No. 1
- Sumarni, Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 3 No.2, 111-123
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2,
- Pelour, Stephanus & Ina Heliany. 2018 peran lembaga swadaya masyarakat (Lsm) terhadap pembangunan politik dan demokrasi di indonesia *jurnal ilmiah hukum de'jure: kajian ilmiah hukum*

INTERNET

<http://kab-gunungkidul.kpu.go.id>

<http://pilkada2015.kpu.go.id>

Yudha, Giovani. 2018.

[http://www.academia.edu/37953287/PEMBERDAYAAN POLITIK RWA NDA.docx](http://www.academia.edu/37953287/PEMBERDAYAAN_POLITIK_RWA_NDA.docx)

Administrator, YSKK. 2019. <https://www.yskk.org>

Sutopo. 2015. <https://Desawatusigar.Gunungkidulkab.Go.Id/>

Realyta, Elfrida. 2020. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32038>

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435888; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2693/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2021 Semarang, 06 Desember 2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Direktur Pelaksana LSM YSKK

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peran LSM YSKK dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Desa (Studi pada Desa Karangmojo, Gunung Kidul) "

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Risqo Ilham P
NIM : 1606016031
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Pacitan, 10 mei 1998
CP/e-mail : 0823 35690192 / risqoprarnudya@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Hariadi
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Dsn. Jetis, Ds. Sanggrahan, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Foto Kegiatan



(foto wawancara dengan bu lusi ketua devisi pemberdayaan perempuan LSM YSKK)



(foto diskusi panel dalam peluncuran program sekolah kepemimpinan perempuan)



(Foto pelaksanaan program pada Kelompok Wanita Tani/KWT)



(Foto pasca kegiatan sekolah kepemimpinan perempuan)



(Foto kegiatan sekolah kepemimpinan perempuan)



(kegiatan musrenbangdes)



(foto pendampingan rapat anggota tahunan koperasi wanita)



(Foto monitoring pasca program)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Risqo Ilham Pramudya
2. NIM : 1606016031
3. TTL : Pacitan, 10 Mei 1998
4. Alamat : Rt 01/10, Jetis, Sanggrahan, Kebonagung, Pacitan
5. Agama : Islam
6. No. Hp : 082335690192
7. Email : risqopramudya@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. TK Istiqomah Citeureup Bogor
2. SD N Sanggrahan I Pacitan
3. SMP N 2 Kebonagung Pacitan
4. SMK N Kebonagung Pacitan

Demikian Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.